ENEWSLETTER
PKSPARLEMEN
KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF
Edisi November I Tahun 2022 No. 43

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PKS

H. Ecky Awal Mucharam

Daya Beli Masyarakat Makin Anjlok

Pemerintah Harus Kendalikan Inflasi

Memajukan Budaya Bangsa

Indonesia demikian kaya dengan suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Indonesia juga begitu kaya dengan bahasa, dialek, dan logat. Semuanya punya keunikan dan kekhasan. Hebatnya semua hidup berdampingan secara damai sejak dulu kala tanpa ada keinginan untuk menjadi lebih dominan dibandingkan yang lain.

Pancasila disebut sebagai kulminasi atau puncak puncak budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jika kulminasinya tercermin dalam sila-sila Pancasila yang demikian luhur, apatah budaya bangsa kita begitu luhur sebagai warisan nenek moyang yang pantas kita jaga, rawat, majukan bersama.

Indonesia demikian kaya dengan suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Indonesia juga begitu kaya dengan bahasa, dialek, dan logat. Semuanya punya keunikan dan kekhasan. Hebatnya semua hidup berdampingan secara damai sejak dulu kala tanpa ada keinginan untuk menjadi lebih dominan dibandingkan yang lain.

atu ciri khas bangsa kita, semua nilai budaya itu mendapat tempat dan penghormatan yang layak dari seluruh rakyat. Semuanya memandang dalam kaca mata positif bahwa setiap nilai budaya memberi warna bagi keindonesiaan. Bukan hanya memberi warna tapi juga mengokohkan jati diri bangsa Indonesia.

Itulah yang mendasari jaminan konstitusi UUD 1945 terhadap eksistensi kebudayaan bangsa. Pasal 32 UUD 1945 menyatakan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Kalau kita pelajari secara mendalam kebudayaan suku suku bangsa di setiap wilayah Indonesia sarat dengan nilai nilai kemanusiaan bahkan peradaban yang tinggi. Budaya Jawa misalnya berpegang pada nilai seperti keyakinan/keteguhan, pencapaian, kesabaran dan keselarasan, sopan santun/tepo seliro.

Masyarakat Lampung punya lima filosofi yang maknanya sama dengan Pancasila mulai dari kebersihan hati, memuliakan tamu, ikut berjuang dalam menegakkan kebenaran, tolong menolong dalam persatuan, dan pemberian gelar gelar bagi orang yang berprestasi.

Budaya Sunda ditopang

oleh nilai silih asih, silih asah, silih asuh, cageur, bageur, bener, singer, dan pinter. Budaya Minang menganut nilai kerendahan hati dan penghargaan terhadap orang lain, nilai kesepakatan/ musyawarah, nilai ketelitian dan kecermatan, nilai patuh dan taat pada adat serta syara', dll.

Budaya Bugis lain lagi terdapat nilai-nilai yaitu alempureng 'kejujuran', amaccang 'kecendekiaan', asitinanjang 'kepatuhan', agettengeng 'keteguhan', reso 'usaha', dan siriq 'harga diri'. Dan masih banyak lagi nilai budaya luhur tiap suku bangsa di Indonesia.

Budaya Dayak menganut nilai kebersamaan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama, rasa kesetiakawanan, penghargaan terhadap warisan leluhur, dan menjunjung tinggi nilai kerohanian atau keagamaan.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini upaya menjaga dan melestarikan budaya bangsa di atas bukan perkara sederhana dan mudah karena berkelindan dengan derasnya arus informasi bahkan infiltrasi budaya asing yang bukan saja berbeda tapi juga bertentangan dengan budaya bangsa dan adat istiadat yang berlaku.

Perubahan gaya hidup akibat masuk dan merebaknya paham kebebasan (liberalisme), individualisme, sekularisme, dan lainnya telah menggeser nilai budaya terutama pada generasi muda. Nilai budaya kolektivisme atau kebersamaan/gotong royong, sopan santun, menjunjung nilai agama dan seterusnya sudah banyak terkikis oleh nilai-nilai budaya dominan.

Hal tersebut tentu harus menjadi tanggung jawab bersama bagaimana terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan internalisasi nilai budaya kepada anak-anak dan generasi muda. Caranya harus lebih kreatif dengan berbagai instrumen yang disediakan oleh dan sesuai perkembangan zaman.

Dimulai dari institusi keluarga, komunitas masyarakat, lembaga adat, lembaga pendidikan, hingga lembaga negara harus bersama-sama melestarikan dan mamajukan budaya bangsa. Pemerintah harus hadir dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang semakin kokoh dalam melindungi dan melestarikan budaya bangsa Indonesia.

Kita ingin bangsa ini kokoh dalam kepribadian dan karakter yang bersumber dari nilai budaya yang luhur. Kemajuan tidak boleh melunturkan nilai budaya bangsa tapi sebaliknya mengokohkannya karena kita tahu di atas nilai-nilai itulah bangsa Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini upaya menjaga dan melestarikan budaya bangsa di atas bukan perkara sederhana dan mudah karena berkelindan dengan derasnya arus informasi bahkan infiltrasi budaya asing yang bukan saja berbeda tapi juga bertentangan dengan budaya bangsa dan adat istiadat yang berlaku.

Dr. Salim Menyapa Indonesia

Gubernur Riau Sambut Dr. Salim: Semoga Membawa Berkah bagi Riau

KUTIPAN

Pekanbaru (06/11) --- Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri yang didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan rombongan tiba di Pekanbaru, Sabtu (05/11/2022) sore.

Kedatangan Dr. Salim disambut dengan oleh Gubernur Riau (Gubri) Drs H. Syamsuar, M.Si bersama Pengurus BPW PKS Sumbagut, Pengurus DPTW PKS Riau di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Sabtu (05/11/2022).

Pada kesempatan itu, Gubernur Riau, Syamsuar, mengucapkan selamat datang dan tahniah atas kunjungan Dr Salim dan rombongan ke Riau.

"Semoga kehadiran Habib Salim ke Riau bisa membawa keberkahan bagi Riau dan sekaligus juga dapat memotivasi kami untuk membangun negeri lebih maju dan baik serta mudah-mudahan senantiasa memelihara keberkahan bagi Riau dengan sebaik-baiknya," terangnya.

Sementara itu, Dr. Salim menuturkan ucapan terima kasih atas sambutan dan jamuan dari Gubernur Riau yang sangat luar biasa, dan suasana yang sangat kondusif.

"Kami akan doakan selalu agar provinsi Riau diberikan keberkahan, semakin maju dan sukses, InsyaAllah PKS selama bersama seluruh masyarakat Riau untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini," tutup Dr. Salim.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Salim bersama Rombongan disambut dengan Pencak Silat dan pemasangan Tanjak sebagai ucapan selamat datang.

Drs H. SYAMSUAR, M.Si
Gubernur Riau

"Semoga kehadiran Habib Salim ke Riau bisa membawa keberkahan bagi Riau dan sekaligus juga dapat memotivasi kami untuk membangun negeri lebih maju dan baik serta mudah-mudahan senantiasa memelihara keberkahan bagi Riau dengan sebaik-baiknya,"

Dr. Salim Mendapat Gelar Adat "Datuk Maulana Sukmajaya" dari Lembaga Adat Melayu Siak

KUTIPAN

Kabupaten Siak (06/11) – Ketua Umum Persatuan Ulama Muslim Internasional sekaligus Ketua Mejelis Syura PKS Habib Dr. Salim Segaf Aljufri mendapat anugerah Gelar Adat dari Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak bergelar 'Datuk Maulana Sukmajaya' pada Minggu (6/11).

Gelar tersebut maknanya tokoh yang dihormati sebagai ulama panutan umat, pemimpin yang berjiwa besar, serta kesetiaannya terhadap negara.

Selanjutnya, Menteri Sosial 2009-2014 ini melakukan prosesi adat penganugerahan gelar oleh Lembaga Adat Melayu Siak dihantarkan langsung oleh Bupati Siak Alfedri beserta Wakil Bupati Husni Merza dari Rumah Dinas Bupati Siak. Prosesi berjalan meriah namun tetap khidmat di bawah arahan para tetua adat Siak yang dipimpin oleh Ketua LAM Siak Datuk Seri Wan Said.

Dr. Salim dinilai layak mendapat gelar adat kehormatan karena ketokohan dan keteladanannya sebagai ulama yang diakui dunia sekaligus tokoh pemimpin yang berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Untuk diketahui Dr. Salim pernah dipercaya negara sebagai Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Kerajaan Oman (2005-2009) dan Menteri Sosial RI (2009-2014). Habib Dr. Salim Segaf Aljufri saat ini mendapat kepercayaan sebagai Ketua Umum Persatuan Ulama Muslim Internasional.

Dalam sambutannya Dr. Salim mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada Lembaga Adat Melayu.

"Satu kehormatan yang luar biasa mendapat gelar adat sekaligus terikat kekerabatan dengan warga Siak. Gelar adat ini punya konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Tapi kita yakin kebersamaan adalah kunci keberhasilan," ungkap Dr. Salim.

Menurut Dr. Salim banyak sekali khazanah dan keteladanan budaya khususnya dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. "Di awal negara ini berdiri Kerajaan Siak Sri Indrapura menyatakan bergabung kepada Republik. Bahkan Sultan Syarif Kasim II yang memimpin Siak saat itu menyumbangkan 13 juta gulden atau senilai 1,4 triliun untuk membantu negara yang diberikan langsung kepada Presiden Sukarno," ungkapnya.

Hal ini, lanjut Dr. Salim, menunjukkan kebesaran hati dan kesediaan berkorban bagi NKRI yang ditunjukkan oleh leluhur Kerajaan Siak Sri Inderapura. Sultan Syarif Kasim II dan Kerajaan Siak jasanya luar biasa bagi negara. "Bisa jadi negara belum bisa membalas jasa-jasa Siak tapi setidaknya ijinkan kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran," ungkap Dr. Salim.

Bangsa Indonesia bangsa besar, lanjut Dr. Salim, ada 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa dan 715 bahasa serta 6 Agama resmi. Dibutuhkan lebih banyak tokoh bangsa yang berpikir dan berjiwa besar seperti leluhur Kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang tulus berkorban dan mencintai negeri ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. SALIM
Ketua Majelis Syuro PKS

"Satu kehormatan yang luar biasa mendapat gelar adat sekaligus terikat kekerabatan dengan warga Siak. Gelar adat ini punya konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Tapi kita yakin kebersamaan adalah kunci keberhasilan,"

Program Dialog Kebangsaan Dr. Salim Bersama Tokoh Riau : Kebersamaan Kunci Keberhasilan Bangsa

KUTIPAN

Pekanbaru (06/11) --- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Riau menggelar acara Dialog Kebangsaan Lintas agama, budaya, dan organisasi bersama Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri di Pekanbaru (Minggu, 6/11/2022).

Acara ini adalah rangkaian Program Dr. Salim Menyapa Indonesia di Provinsi Riau 5-8 November 2022.

Hadir para tokoh lintas agama dari MUI, DDII, FKUB, para pejabat publik legislatif dan eksekutif, pimpinan dan pengurus ormas, organisasi sosial, perempuan, dan pemuda serta tokoh pengusaha.

Dr. Salim dalam Orasi Kebangsaannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para tokoh yang hadir dan kesediaan berdialog dengan PKS untuk mengokohkan titik temu dan ikatan kebangsaan. PKS terus mengajak berbagai elemen bangsa untuk bergandengan tangan, membangun kebersamaan dan kolaborasi untuk kemajuan bangsa.

"Kemajemukan bangsa Indonesia ini luar biasa. Ada banyak perbedaan bangsa kita. 17.508 pulau, 1300 suku bangsa, 715 bahasa, 6 agama resmi. Tapi diantara banyaknya perbedaan itu kita memilih untuk bersatu dan terus mengupayakan titik temu kebangsaan hingga kita bisa bertahan sampai hari ini," ungkap Dr. Salim.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini menyampaikan tiga pesan kebangsaan. "Pesan bersama, kita semua pasti siap mencintai NKRI. Pesan kedua, kita semua juga pasti siap menjaga dan membela NKRI. Dan pesan ketiga, kita harus siap berkolaborasi untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Menurut Dr. Salim berbuat untuk negeri ini pasti tidak akan berkesudahan sebagaimana menjadi bangsa Indonesia adalah proses yang panjang, _being Indonesia is never ending proces_. "Kalau bukan kita siapa lagi yang akan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," tandasnya.

Ketua Persatuan Ulama Internasional ini melihat Indonesia punya potensi luar biasa, namun sayangnya belum bisa dikelola dengan baik. Kita masih jadi negara berkembang. Kita juga masih kalah bersaing dengan negara-negara di dunia. "Maka tugas kita membangun martabat bangsa sehingga diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia," katanya.

Sebaliknya, lanjut Dr. Salim, kita punya prasyarat dan peluang untuk menjadi bangsa maju. Sumber daya alam kita melimpah, SDM kita melimpah dan semakin baik kualitasnya. Hal ini masih ditambah karakter bangsa kita juga luar biasa. Kita punya local wisdom yang dahsyat : santun, pemaaf, menghormati orang lain, solider, gotong royong. Ini bisa menjadi modal kemajuan bangsa di tangan pemimpin yang tulus.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. SALIM
Ketua Majelis Syuro PKS

"Kemajemukan bangsa Indonesia ini luar biasa. Ada banyak perbedaan bangsa kita. 17.508 pulau, 1300 suku bangsa, 715 bahasa, 6 agama resmi. Tapi diantara banyaknya perbedaan itu kita memilih untuk bersatu dan terus mengupayakan titik temu kebangsaan hingga kita bisa bertahan sampai hari ini

Tifatul Sembiring: Pemerintah Berhak Cabut LPS yang Tak Ikuti Migrasi Analog ke Digital

KUTIPAN

Jakarta (07/11) --- Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai, pemerintah berhak mencabut izin lembaga penyiaran swasta (LPS) yang enggan mengikuti program analog switch-off (ASO) atau migrasi televisi analog ke digital.

Hal itu tersebut merupakan salah satu upaya dan sanksi tegas pemerintah bagi LPS yang bandel atas peraturan tersebut.

"Untuk sanksi, ditutup saja izin (penyiaran) analog (LPS) itu. Pemerintah berhak menutup karena ada peraturan, ada dasarnya juga di undang-undang," kata Tifatul seperti dikutip dari Antara, Minggu (6/11/2022).

"Dari sisi logika, mulai dari teknologi, efisiensi, kualitas (televisi digital) sudah jelas. Maka, dari sisi hukum juga perlu tegas. Law follows the technology, lagi pula teknologi digital ini sudah lama ada," lanjutnya.

Migrasi siaran analog ke siaran digital, diinisiasi Tifatul saat masih menjabat sebagai Menkominfo. Namun hingga masa jabatannya berakhir pada 2014, rencana tersebut belum terealisasi.

Ia menerangkan, siaran televisi ke digital merupakan keniscayaan teknologi yang tak dapat terhindari, mengingat berbagai negara di seluruh dunia juga telah melakukan hal yang sama.

Selain itu, peralihan ke TV digital juga berdampak pada efisiensi spektrum frekuensi yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat sebagai pengguna teknologi komunikasi.

"Ada digital dividen, sisa kelebihan spektrum karena kita beralih ke digital. Nah, ini bisa digunakan untuk komunikasi data, internet, dan lainnya," ujar politisi PKS itu.

"Kemudian, dari sisi efisiensi power listrik. Untuk masyarakat sebagai pengguna, TV analog itu (dayanya) 200 watt. Sedangkan TV digital cuma 40-60 watt. Selain itu, sisi kualitas gambar dan suara pun bening. Jadi lebih bagus untuk dinikmati masyarakat," sambungnya.

ini, migrasi siaran analog ke digital merupakan perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id

Foto : Dok. Humas FPKS DPR RI

Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
Anggota Fraksi PKS DPR RI

"Peralihan ke TV digital juga berdampak pada efisiensi spektrum frekuensi yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat sebagai pengguna teknologi komunikasi.Ada digital dividen, sisa kelebihan spektrum karena kita beralih ke digital. Nah, ini bisa digunakan untuk komunikasi data, internet, dan lainnya,"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Tanggapi Pernyataan MK, Aleg PKS: Potensi Penyalahgunaan Wewenang Menjadi Terbuka

KUTIPAN

Jakarta (02/11) --- Anggota Komisi II dari Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan pendapatnya mengenai pernyataan MK yaitu menteri yang maju capres tak harus mundur tapi dapat izin dari Presiden.

MK memutuskan terkait perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 menyangkut pengujian materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penjelasan MK bahwa syarat pengunduran diri bagi pejabat negara yang dicalonkan partai politik atau parpol peserta pemilu atau koalisi parpol sebagai capres atau cawapres mesti mengundurkan diri dari jabatannya tak lagi relevan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Mardani menyampaikan pendapatnya bahwa tanpa putusan MK, Capres harusnya tergerak dari hati Nurani nya.

"Capres adalah orang yg siap berperilaku sebagai negarawan. Tanpa putusan MK atau putusan apapun, seorang Capres digerakkan oleh hati nuraninya. Masih menjabat sebagai menteri dan nyapres mestinya bertentangan dgn sikap negarawan. Amanah menteri itu berat."

Mardani menyampaikan bahwa efektivitas pemerintahan bisa terganggu karena yang bersangkutan memanfaatkan program kementerian untuk tujuan elektoral.

"Amanah capres jg super berat, efektivitas pemerintahan pun bisa terganggu. Pengawasan penyalahgunaan menteri yg mencalonkan diri sebagai capres/cawapres wajib ditingkatkan. Tidak etis jika ybs memanfaatkan program kementerian untuk tujuan elektoral."

Ia menambahkan bahwa potensi penyalahgunaan wewenang menjadi terbuka karena pernyatan MK tersebut.

"Di atas hukum positif ada etika dan norma. Jikapun legal formal 'dibenarkan' namun secara moral etika jelas menjadi lemah, krn potensi penyalahgunaan wewenang menjadi terbuka. Ayo publik kita lihat mana capres yg siap jadi negarawan." Tutup Anggota DPR RI Dapil Jakarta 1.

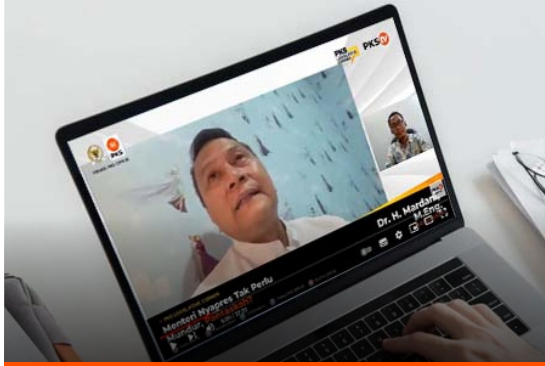

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

"Efektivitas pemerintahan bisa terganggu karena yang bersangkutan memanfaatkan program kementerian untuk tujuan elektoral. Amanah capres jg super berat, efektivitas pemerintahan pun bisa terganggu. Pengawasan penyalahgunaan menteri yg mencalonkan diri sebagai capres/cawapres wajib ditingkatkan. Tidak etis jika ybs memanfaatkan program kementerian untuk tujuan elektoral

Kasus Gagal Ginjal Akut, Habib Aboe: Tegakkan Hukum, Beri Rasa Aman Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (30/10) –- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboebakar Alhabsy menanggapi kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada sejumlah anak-anak.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, kasus gagal ginjal akut pada anak harus menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para penegak hukum.

"Jika memang gagal ginjal tersebut disebabkan oleh sirup atau obat untuk anak, maka perlu penyelidikan dan penegakan hukum atas persoalan ini," tegas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Karena, imbuhnya, pada prinsipnya sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, sebagaimana peraturan pemerintah yang berlaku.

"Dilaporkannya dua perusahaan oleh BPOM kepada pihak kepolisian merupakan indikasi adanya aspek pidana dalam persoalan ini. Oleh karenanya, Polri perlu melakukan pendalaman atas persoalan tersebut," terang Habib Aboe.

Produsen sirup untuk anak, tandasnya, harus bertanggung jawab terhadap sediaan farmasi yang diproduksi. Sebagaimana PP tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, produsen dapat dikenai pidana jika sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

"Penegakan hukum pada kasus gagal ginjal akut ini diperlukan untuk memberikan rasa keamanan di tengah masyarakat," ujarnya.

Karena, kata Habib Aboe, dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat akan merasa terlindungi atas sediaan farmasi yang beredar.

"Adanya pengawasan ataupun penindakan oleh aparat berwenang akan membuat masyarakat merasa aman mengkonsumsi produk sediaan farmasi di pasaran," tutup Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

> “Produsen sirup untuk anak, harus bertanggung jawab terhadap sediaan farmasi yang diproduksi. Sebagaimana PP tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, produsen dapat dikenai pidana jika sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. “

Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Andi Akmal Minta Harga Gabah Dikondisikan

KUTIPAN

Jakarta (29/10) –– Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan, petani saat ini serius memproduksi pangan kebutuhan masyarakat. Namun, problem besar yang dihadapi petani saat ini adalah persoalan harga. Petani masih menghadapi serba ketidakpastian terutama saat terjadi panen raya.

Untuk itu, Akmal mengingatkan pentingnya menjaga harga gabah di tingkat petani melalui kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Langkah ini untuk menjaga petani terus semangat dalam meningkatkan produksi pertaniannya.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Menaikkan HPP gabah merupakan solusi terbaik saat ini. Seperti halnya Harga jagung, saat ini HPP-nya masih bagus. Petani di Sulawesi Selatan masih gemar menanam jagung karena harganya sesuai dengan harapan," ungkap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini meminta agar pemerintah di semua sektor yang menangani pangan agar terus mengendalikan harga komoditas pangan. Selain di pasar, pengendalian harga di tingkat petani pun harus terjamin sehingga kenaikan harga pangan sejalan dengan peningkatan pendapatan petani.

"Indonesia masih terus terancam pada keterpurukan ekonomi nasional. Ini akibat inflasi yang terus tidak terkendali yang ditunjukkan dengan semua harga yang terus bergejolak terutama harga pangan. Saya sudah sering mengingatkan bahwa saat ini rakyat menjerit akibat harga pangan melangit, di berbagai forum baik formal maupun informal," tegas Akmal.

Anggota DPR putra kelahiran Bone ini masih mengkritisi program diversifikasi pangan yang mandek. Padahal menurutnya, gagasan ini sudah lama digulirkan oleh pemerintah melalui kementerian pertanian pimpinan Anton Apriyantono.

"Semua negara saat ini sudah memberikan prioritas pangan sebagai komoditas utama pada negara masing-masing. Karena urusan perut ini tidak dapat ditunda. Program kerakyatan yang berfokus pada peningkatan pangan mestinya diutamakan oleh pemerintah untuk menggerakkan semua roda ekonomi. Infrastruktur yang bangun untuk mempermudah produksi, distribusi dan pemasaran pangan. Teknologi dan riset pengetahuan difokuskan ke pengembangan pangan termasuk hortikultura. Ini yang mesti dilakukan membaurkan kebijakan dengan potensi terbesar sebuah negara", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Semua negara saat ini sudah memberikan prioritas pangan sebagai komoditas utama pada negara masing-masing. Karena urusan perut ini tidak dapat ditunda. Program kerakyatan yang berfokus pada peningkatan pangan mestinya diutamakan oleh pemerintah untuk menggerakkan semua roda ekonomi. Infrastruktur yang bangun untuk mempermudah produksi, distribusi dan pemasaran pangan."

Harga Pangan Mulai Naik, Aleg PKS Dorong Badan Pangan Nasional Bentuk Sistem Pangan yang Kuat

KUTIPAN

Jakarta (02/11) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengingatkan pemerintah terkait fluktuasi harga komoditas pangan akhir-akhir ini dimana sejumlah bahan pangan terpantau mengalami kenaikan harga seperti komoditi bawang putih, minyak goreng, dan gula pasir.

"Jika kita pantau per 1 November 2022 maka terlihat harga gula pasir tercatat naik paling tinggi secara persentase yang mencapai 0,33% dan dilihat dari inflasi pada Oktober kemarin sebesar 4,73% maka pemerintah harus hati-hati menjelang tahun baru nanti, jangan sampai kegagalan mengendalikan harga terus berulang," ucap Johan.

Johan mendorong Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menjalankan fungsinya sesuai amanat UU tentang pangan maupun Perpres No. 66/2021 yang berfungsi sebagai regulator kebijakan dan stabilisasi pangan.

"Untuk saat ini saya minta Badan Pangan Nasional segera membentuk sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan agar menjadi dasar tata Kelola bagi kepentingan pangan nasional, khusus untuk persoalan harga komoditas pangan diharapkan mampu melakukan pengendalian harga melalui penyediaan stok dan rantai pangan yang efisien," imbuh Johan seraya berharap lembaga ini bergerak cepat menghadapi kompleksitas persoalan pangan saat ini.

Politisi PKS ini menilai saat ini daya beli masyarakat semakin anjlok, maka dituntut pemerintah harus mampu mengendalikan harga komoditas pangan sebab hal ini menyangkut urusan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

"Kalo kita lihat harga pangan saat ini tidak dapat diperkirakan secara akurat oleh pemerintah sehingga dampaknya selalu kesulitan mitigasi risiko dari lonjakan kenaikan harga komoditi tersebut. Saya melihat upaya pengendalian harga pangan secara nasional harus dimulai dari ketegasan terhadap akar penyebab dari volatilitas harga yang tinggi yakni banyaknya produk pangan yang masih impor, jadi untuk mengatasi persoalan harga pangan harus dimulai dengan peningkatan produktivitas pangan di dalam negeri serta tegas menghentikan impor," urai Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya menekankan agar dimunculkan semacam Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap ancaman krisis pangan, hal ini agar negara tidak lalai terhadap hajat hidup rakyat Indonesia. Contoh kondisi yang harus diwaspadai dari sisi stok pangan, kita temukan per Oktober 2022 bahwa stok cadangan beras pemerintah di Bulog hanya sekitar 673 ribu ton padahal mestinya stok cadangan itu harus berkisar 1 juta hingga 1,5 juta ton beras setiap saat" ungkap

Aleg PKS: Atasi Backlog, DJPU Harus Naikkan Target Penambahan Rumah di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (09/11) --- Meski ada tantangan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan. Direktorat Jenderal Perumahan (DJPU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meyakini target Program Sejuta Rumah Tahun (PSR) 2022 akan tercapai.

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat ikut optimis dengan upaya DJPU tersebut. Pasalnya pertumbuhan sektor properti tumbuh positif paska pandemi. Namun politisi asal PKS ini pesimis PSR dapat mengatasi tingginya angka kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) rumah di Indonesia.

"Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Belum ditambah dengan pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar lebih kurang 750.000 per tahun," ujarnya.

Kondisi ini tambah Toriq menjadi pekerjaan rumah (PR) besar untuk Pemerintah khususnya Kementerian PUPR. Permasalahan bidang perumahan di Indonesia harus diselesaikan dengan serius dan memerlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan yang bergerak di sektor perumahan.

"Melihat neraca kebutuhan dan penyediaan perumahan yang belum seimbang. Program Sejuta Rumah saat ini perlu dievaluasi. Dengan berkaca pada pertumbuhan keluarga baru setiap tahun maka target program penyediaan rumah harus ditambah minimal 500.000 per tahun," jelasnya.

Persoalan elementer yang sering dihadapi dalam program perumahan juga harus diselesaikan oleh DJPU Kementerian PUPR, tambah Toriq lagi. Pertama keterbatasan lahan di perkotaan. Kebanyakan lahan di perkotaan yang ada saat ini dikuasai oleh para pengembang besar dan peruntukannya bukan untuk hunian.

"Keadaan ini membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi mengalami kesulitan karena harga lahan di perkotaan yang tidak terjangkau. Padahal perkotaan merupakan titik pertumbuhan keluarga baru dengan prosentase terbesar dibanding di pedesaan," tuturnya.

Yang kedua adalah tidak ada basis data perumahan. Pemerintah daerah belum memiliki basis data perumahan yang dibutuhkan pemerintah pusat untuk mengetahui jumlah kebutuhan rumah masyarakat di tiap daerah.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

"Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar untuk Pemerintah khususnya Kementerian PUPR. Permasalahan bidang perumahan di Indonesia harus diselesaikan dengan serius dan memerlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan yang bergerak di sektor perumahan.Melihat neraca kebutuhan dan penyediaan perumahan yang belum seimbang. Program Sejuta Rumah saat ini perlu dievaluasi. Dengan berkaca pada pertumbuhan keluarga baru setiap tahun maka target program penyediaan rumah harus ditambah minimal 500.000 per tahun,"

Daya Beli Masyarakat
Makin Anjlok

Pemerintah Harus Kendalikan Inflasi

Tingginya inflasi pangan makin mengancam daya beli masyarakat.

Harga pangan naik dalam satu tahun

Sejak awal tahun rupiah sudah melemah sebanyak

8,87%

"Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari sebelumnya 124,7 menjadi 117,2, artinya terjadi penurunan signifikan pada keyakinan konsumen, situasi ini tidak baik karena kita akan menghadapi tantangan lebih berat tahun depan terkait ketidakpastian ekonomi global

H. Ecky Awal Mucharam
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | @fpksdprri | **DATA :** Rilis Berita FPKS DPR RI | **INFOGRAFIS :** Aditya

Jelang KTT G20, Nevi Zuairina Minta Pemerintah Libatkan Semua UMKM

KUTIPAN

Jakarta (28/10) –– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menanggapi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022, meminta agar pemerintah dapat melibatkan semua segmen UMKM dan menunjukkan kepada dunia internasional potensi UMKM yang kita miliki.

Pasalnya, lanjut Nevi, rencana Pemerintah menampilkan beragam hasil karya terbaik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih terlihat terlalu sempit dalam pelibatan UMKM pada kegiatan KTT G20. Ia mencontohkan bahwa beberapa waktu lalu telah dirilis 22 UMKM yang menjadi pemasok souvenir resmi KTT G20.

"Saya menilai, pelibatan UMKM di KTT G20 merupakan langkah yang cukup bagus. Akan tetapi dalam proses pemilihan UMKM yang layak dilibatkan juga harus benar-benar transparan. Proses sosialisasinya juga harus dilakukan secara masif dan menyeluruh, agar sekitar 65 juta UMKM di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam perhelatan G20 nanti," tutur Nevi.

Nevi menambahkan, masih ada potensi bagi para UMKM untuk ikut ambil bagian pada acara tersebut terutama UMKM binaan BUMN maupun instansi yang terlibat pada rangkaian G20. menurutnya, semua pelaku UMKM harus dilibatkan dalam KTT G 20, tidak hanya menampilkan komoditas di pameran, namun juga sebagai support sistem dalam penyediaan berbagai kebutuhan seperti souvenir, seminar kit, dekorasi, konsumsi makanan ringan dan lain sebagainya.

"KTT G20 ini merupakan perhelatan besar pada skala internasional. Sedangkan UMKM di Indonesia, semua memiliki potensi yang sama untuk ikut terlibat dalam KTT G20. Oleh karenanya Pemerintah harus benar-benar transparan dalam proses pemilihannya," pinta Nevi.

Dengan momentum Presidency G20 Indonesia dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali ini, Legislator asal Sumatera Barat II ini menyarankan kepada pemerintah, agar terus berupaya membangun kemitraan dalam rantai pasok. Menurutnya, para UMKM mesti terus terlatih dalam bermitra sehingga dalam setiap event akan piawai dalam berkolaborasi. Sehingga pendampingan sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mesti dipastikan 40% belanja APBN dan APBD mengarah untuk produk UMKM.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya menilai, pelibatan UMKM di KTT G20 merupakan langkah yang cukup bagus. Akan tetapi dalam proses pemilihan UMKM yang layak dilibatkan juga harus benar-benar transparan. Proses sosialisasinya juga harus dilakukan secara masif dan menyeluruh, agar sekitar 65 juta UMKM di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam perhelatan G20 nanti,"

"Potensi KTT G20 ini diperkirakan membuka 33.000 lapangan kerja dengan nilai konsumsi mencapai Rp1,7 triliun. Ini sangat besar dan akan menggerakkan roda ekonomi terutama para pelaku UMKM. Pemerintah mesti mampu mengoptimalkan ini semua untuk kepentingan rakyat Indonesia," tutup Nevi Zuairina.

Kunker Ke Maluku, Aleg PKS Minta Pemerintah Fokus Tingkatkan Ekspor dari Kekayaan Laut

KUTIPAN

Ambon (03/11) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada kesempatan kunjungan kerja Komisi VI ke Maluku, memperhatikan bahwa Ada 2 program utama yang sedang dikembangkan di Maluku yaitu Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN).

"Dengan ketersediaan ikan berlimpah di Maluku, serta wilayah laut yang strategis, perlu dukungan Infrastruktur yang kuat untuk mengembangkan 2 potensi tersebut. Untuk itu, Saya minta pemerintah fokus pada peningkatan ekspor dari kekayaan laut Indonesia, terutama daerah Indonesia Timur. Untuk itu, janji-janji pemerintah pada realisasi program utama di Maluku yakni ANP dan LIN mesti segera direalisasikan," pinta Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, jumlah dan kapasitas cold storage yang ada di Maluku tidak lebih dari 20.000 ton yang tersebar di beberapa pulau. Ditambah lagi, jumlah industri perikanan juga terbatas. Dengan segala kondisi saat ini, membuat Maluku tidak memperoleh multiplier effect dari sumber daya ikan yang melimpah di perairan Arafura, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku.

"Penguatan internal industri maritim mulai dari perikanan tangkap dan infrastrukturnya, akan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus ada potensi besar melakukan ekspor komoditas perikanan. Alam Indonesia sangat mampu memenuhi kebutuhan ikan, akan tetapi kemauan dan kemampuan kita masih perlu ditingkatkan untuk optimalisasi ekspor komoditas perikanan tangkap," ungkap Nevi.

Namun, Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan, bahwa Jumlah Tangkapan Diperbolehkan (JTB) atau potensi lestari di perairan sebesar 80 persen dari potensi yang ada, maka peluang penangkapan ikan di tiga WPPNRI tersebut sebanyak 3.735.224 ton per tahun.

Nevi menambahkan, pentingnya optimalisasi komoditas perikanan tangkap ini sangat diperlukan, karena selain menjadi tumpuan peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan dimulai memerangi stunting, sekaligus meningkatkan kecerdasan, juga meningkatkan sumber pemasukan negara dari ekspor. Potensi besar laut Indonesia ini tidak dimiliki banyak negara sehingga kerap kali kapal asing masuk perairan Indonesia dengan mengeksploitasi kekayaan bangsa ini.

"Bangsa ini semestinya dapat sejajar dengan negara-negara maju, dengan segala potensinya mulai dari jumlah penduduk, jumlah kepulauan termasuk kekayaan lautnya. Untuk itu, fokus peningkatan kekayaaan Laut Indonesia untuk ekspor harus menjadi prioritas bagi pemerintah", tutup Nevi Zuairina.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Penguatan internal industri maritim mulai dari perikanan tangkap dan infrastrukturnya, akan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus ada potensi besar melakukan ekspor komoditas perikanan. Alam Indonesia sangat mampu memenuhi kebutuhan ikan, akan tetapi kemauan dan kemampuan kita masih perlu ditingkatkan untuk optimalisasi ekspor komoditas perikanan tangkap,"

Aleg PKS Tolak Wacana Penggunaan Jaringan Listrik PLN oleh Swasta

KUTIPAN

Jakarta (01/11) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan, Fraksi PKS menolak wacana penggunaan bersama jaringan listrik PLN oleh IPP atau perusahaan listrik swasta. Sebab hal ini akan makin meliberalisasi sektor ketenagalistrikan.

Mulyanto mengingatkan dengan penggunaan bersama jaringan listrik maka penguasaan listrik oleh negara yang dimandatkan kepada perusahaan negara (PLN) semakin dikurangi.

"Dari sistem yang terintegrasi (bundling) dari produksi, transmisi dan distribusi dengan power wheeling ini menjadi semakin terpecah-pecah (unbundling) dan sebagian diserahkan ke pihak swasta. Ini masalah mendasar terkait filosofi pengelolaan ketenagalistrikan, sebagai cabang usaha penting dan strategis yang dikuasai negara, sesuai amanat konstitusi," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan konsep power wheeling semakin menerabas filosofi dasar pengelolaan listrik oleh negara. Padahal hal tersebut amanah konstitusi.

"Selain itu, di tengah surplus listrik yg lebih dari 60 persen, tekanan operasinal yang besar, termasuk membayar penalti klausul TOP (take or pay) dari IPP; utang yang mencapai Rp. 600 triliun. Belum lagi listrik dari program 35 Giga Watt sudah mulai masuk, maka tekanan terhadap PLN akan semakin besar," ungkapnya.

Dengan power wheeling, imbuhnya, dimana EBT makin bertambah dan wajib diberikan akses kedalam jaringan PLN, maka tentu akan menambah tekanan pada PLN.

"Itulah sebabnya dalam draft RUU EBT dari DPR RI tidak ada soal power wheeling. Kita tidak setuju dengan gagasan liberalisasi sektor kelistrikan ini. PKS minta Pemerintah untuk menghapus pasal terkait dgn power wheeling dan segera mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU EBT," tegasnya.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Itulah sebabnya dalam draft RUU EBT dari DPR RI tidak ada soal power wheeling. Kita tidak setuju dengan gagasan liberalisasi sektor kelistrikan ini. PKS minta Pemerintah untuk menghapus pasal terkait dgn power wheeling dan segera mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU EBT,"

Kunjungi Asrama Haji Banjarmasin, Nur Azizah: Kesejahteraan Jemaah Haji Nomor Satu

KUTIPAN

Banjarmasin (03/11) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, bersama Komisi VIII DPR RI lakukan kunjungan kerja spesifik ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis (03/11/2022).

Nur Azizah mengunjungi Asrama Haji Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan bersama rombongan Anggota Komisi VIII dari PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PPP.

Pada kunjungan Nur Azizah bersama rombongan melakukan pengawasan dan berdiskusi terkait Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 1443H/2022M.

"Hal ini harus menjadi konsern di tahun depan, mengingat Kalsel salah satu propinsi penyumbang calon Jemaah Haji terbanyak di Indonesia. Karena itu perlu diperhatikan kesejahteraannya, jangan sampai ada jemaah yang terbengkalai", jelas Nur Azizah.

Pada kesempatan ini Nur Azizah bersama rombongan, bertemu dengan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalsel, Kepala Kakan Kemenag Kota Banjarbaru, Kepala UPT Asrama Haji Banjarmasin, Rektor UIN Antasari beserta jajarannya. Nur Azizah Mewakili rombongan menerima plakat dari Wakil Rektor UIN Banjarbaru.

Diskusi berlangsung santai dengan di pimpin Wakil Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang. Membahas kondisi terkini calon Jemaah Haji di Kalimantan Selatan.

Nur Azizah turut menjelaskan, Berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 405 tahun 2022 tentang Kouta Haji Indonesia tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi ditetapkan sebanyak 100.051 jemaah. Dan Kalimantan Selatan merupakan Provinsi dengan calon Jemaah haji terbanyak di Kalimantan.

"Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2022 mendapatkan kuota haji sebanyak 1.743 orang. Dari kuota yang tersedia untuk Pulau Kalimantan, Kalsel adalah yang terbanyak", jelas Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan, di bawah Kalsel, ada Kalimantan Timur dengan jatah kuota sebanyak 1.181 jemaah, disusul Kalimantan Barat sebanyak 1.150 jemaah, Kalimantan Tengah 736 jemaah dan Kalimantan Utara sebanyak 190 jemaah.

Kouta jemaah haji reguler tersebut dialokasikan sesuai dengan alokasi kouta haji provinsi atau kab/kota tahun 1443 H / 2022 M untuk jemaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2022 M dan berusia paling tinggi 65 tahun per tanggal 8 Juli 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi. Bagi jemaah haji yang telah melunasi Bipih tahun 2020 namun tidak termasuk dalam alokasi kuota atau menunda keberangkatan tahun 2022 ini, maka diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sepanjang kouta haji tersedia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Asrama Haji kita tahu berfungsi sebagai tempat Layanan Bimbingan Manasik Haji Gratis setiap hari Sabtu sepanjang tahun oleh UPT. Ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Seksi Pelayanan UPT. Asrama Haji sebagaimana yang tertuang dalam PMA nomor 44 tahun2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji. Sehingga harus betul-betul di Kelola dengan baik"

Beberapa Daerah di Indonesia Direndam Banjir, Aleg PKS: Harap Waspada dan Siaga!

KUTIPAN

Jakarta (03/11) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis (IQL) turut prihatin atas terjadinya bencana banjir yang melanda dibeberapa daerah di Indonesia.

Banjir ini, kata Iskan, mulai melanda di beberapa daerah sejak beberapa bulan kemarin, dari daerah Indonesia bagian barat hingga timur.

Menurut Iskan banjir yang terjadi dibeberapa daerah ini harus segera diatasi dengan seksama dan segera. Dikarenakan dampak dari banjir ini mampu mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi pada kehidupan sehari – hari.

"Kita harus Bersama-sama bergerak dalam mengatasi banjir dibeberapa daerah ini. Ini merupakan bencana alam yang sering terjadi. Harus kita evaluasi semuanya. Kenapa setiap angin barat ini datang kita tidak mampu membendungnya. Kan gitu ya," ucap Iskan.

Dalam keterangnnya, Iskan menyebutkan bahwa ini terjadi karena faktor curah hujan yang sangat tinggi juga. Membuat sungai-sungai meluap dan akhirnya merambat ke rumah-rumah warga yang letaknya lebih rendah dari permukaan air.

''Ini bagaimana caranya harus disiasati oleh BNPB untuk siap siaga mencegah dan menanggulangi agar air – air ini tidak masuk kerumah, menutup aksesbilitas, apalagi sampai merendam rumah. Perlu sinergi dengan para pemerintah daerah. Kalo terus-menerus gini kan rugi kita" kata Iskan saat di jumpai di Gedung DPR RI, Senayan (02/11/2022).

Iskan juga mendesak Kemensos untuk segera hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan untuk para korban bencan alam ini. Karena menurutnya ini sudah sampai meliputi banyak daerah, dari Aceh, Medan, Lampung, Bandung, Madiun, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, NTT, dan daerah lainnya. Yang seharusnya kejadian ini sudah menjadi perhatian nasional.

"Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang penangulannga bencana pada Pasal 7 ayat 2 berbunyi untuk penetapan status bencana nasional salah satunya indikatornya kan dilihat luas wilayah yang terkena bencana. Ini kan sudah sangat banyak dan berarti luas dong, berarti sudah masuk skala massif, jangan selalu banjir ini kita anggap enteng." Ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VIII tersebut.

Iskan juga menambahkan bahwa ada tiga tahapan dalam manajemen banjir dan harus dilaksanakan sesuai kondisi di lapangan. Yaitu, pra bencana, seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terdapat ancaman banjir.

"Selanjutnya ada tanggap darurat, yaitu saat kejadian dan harus ditangani dengan cepat untuk mengurangi resiko. Dan yang terakhir adalah pasca bencana, yang sangat penting, yaitu dengan dilakukannya rehabiltasi dan rekonstruksi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, dan rumah penduduk," urainya.

Iskan berharap kedepan mitigasi dan kesiap siagaan lebih dikedepankan untuk meminimalisir resiko yang ada.

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.
Dapil Sumatera Utara II

''Ini bagaimana caranya harus disiasati oleh BNPB untuk siap siaga mencegah dan menanggulangi agar air-air ini tidak masuk kerumah, menutup aksesbilitas, apalagi sampai merendam rumah. Perlu sinergi dengan para pemerintah daerah. Kalo terus-menerus gini kan rugi kita"

Aleg PKS Minta Arab Saudi Secara Resmi Cabut Syarat Vaksin Meningitis bagi Jemaah Umrah dan Haji

KUTIPAN

Jakarta (02/11) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta Pemerintah Kerajaan Arab Saudi segera mencabut persyaratan vaksin meningitis, khususnya bagi jemaah asal Indonesia.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi perlu konsisten dengan pernyataan mereka. Jika benar mereka ingin memberi kemudahan bagi jemaah kita, sebagaimana diutarakan oleh Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq Alrabiah, dalam kunjungan resmi kenegaraannya ke Jakarta pada pekan lalu, maka realisasikanlah ucapan itu dengan penuh tanggung jawab mengingat kendala utama jemaah kita saat ini adalah akses terhadap vaksin meningitis," kata Bukhori di Jakarta, Selasa (01/11/2022).

Untuk itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini kembali mendorong Kementerian Agama melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar dapat mengumumkan kebijakan itu secara resmi demi memberi kemudahan jemaah Indonesia untuk menunaikan ibadah di tanah suci.

"Persyaratan vaksin meningitis menjadi tidak relevan bagi jemaah umrah di tengah kelangkaan persediaan vaksin tersebut. Semestinya dengan posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah umrah terbesar kedua di dunia, yakni di angka 940 ribuan per tahun, dapat menjadi nilai tawar bagi Pemerintah Indonesia untuk memenangkan lobi dengan Arab Saudi dalam rangka membela kepentingan jemaah kita," jelas Bukhori.

Menurut catatan BPKH, jumlah jemaah umrah Indonesia saat ini berada pada urutan nomor dua tertinggi di dunia. Jumlah jemaah umrah asal Indonesia mencapai 946.962 per tahun, di bawah jemaah asal Pakistan yang mencapai 1,5 juta. Sementara itu, menurut catatan yang sama, apabila rata-rata biaya umrah sebesar Rp 30 sampai Rp 50 juta, maka uang yang berputar setiap tahunnya dapat mencapai Rp 28 sampai Rp 47 triliun.

Alumnus Universitas Islam Madinah Arab Saudi ini menambahkan, kesimpangsiuran informasi soal syarat vaksin meningitis mengakibatkan munculnya berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat. Pihaknya khawatir bila hal tersebut tidak terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan krisis kepercayaan jemaah terhadap Pemerintah Arab Saudi.

"Kami meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk segera mencabut secara resmi ketentuan tentang vaksin meningitis sebagai syarat bagi jemaah umrah dan haji," pungkasnya.

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Persyaratan vaksin meningitis menjadi tidak relevan bagi jemaah umrah di tengah kelangkaan persediaan vaksin tersebut. Semestinya dengan posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah umrah terbesar kedua di dunia, yakni di angka 940 ribuan per tahun, dapat menjadi nilai tawar bagi Pemerintah Indonesia untuk memenangkan lobi dengan Arab Saudi dalam rangka membela kepentingan jemaah kita,"

KOLASE KUTIPAN

Kasus Gagal Ginjal Akut

Tegaknya Hukum Berikan Rasa Aman Masyarakat

Aboe: Produsen Harus Bertang-gungjawab

“Produsen sirup untuk anak, harus bertanggung jawab terhadap sediaan farmasi yang diproduksi. produsen dapat dikenai pidana jika sediaan farmasi tidak memenuhi per-syaratan mutu dan keamanan. “

Alifudin: Tetap Waspada dan Tenang

‘Kita harus waspada tapi harus tetap tenang dan menjawab solusi bersama, serta bahu membahu akan penyelesaian masalah ini, karena jika pikiran tidak tenang akan menimbulkan stres yang akibatnya membuat penyakit"

Kurniasih: Cari Sebab agar Kasus tidak bertambah

"Saat ini yang perlu dilakukan adalah temukan penyebabnya agar tidak ada lagi kasus bertambah. Lalu bisa diselidiki kenapa penyebab itu bisa terjadi apakah karena kesengajaan, kelalaian atau sebagainya,"

Mulyanto: BRIN harus insiatif riset kasus ini

“BRIN yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan riset kese-hatan harus segera mengambil inisiatif strategis tersebut. Jangan membiarkannya berlarut-larut. Apalagi kalau yang muncul hanyalah inisiatif impor obat dengan biaya APBN”

Netty: Perlu dibentuk tim TGIPF

‘Pembentukan tim TGIPF menjadi penting karena sudah ratusan yang meninggal, tapi informasi soal kasus tersebut masih amat terbatas. Selain fokus pada upaya pengobatan korban, pemerintah juga harus fokus pada investigasinya agar kasus ini terang benderang”

Legislator PKS: Investigasi Kasus Gagal Ginjak Akut Harus Transparan

KUTIPAN

Jakarta (28/10) -- Komisi IX DPR RI minta investigasi kasus gagal ginjal akut pada anak dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal ini setelah melihat beberapa laporan yang mengindikasikan ada persoalan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.

Ombudsman RI menyebut ada dugaan maladministrasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemenkes juga sudah membentuk tim investigasi dengan menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan RSCM.

Mabes Polri juga telah membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Pada sisi lain, BPOM juga sampai pada kesimpulan akan menyeret dua perusahaan farmasi ke ranah pidana.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati meminta agar semua proses investigasi yang berjalan dilakukan secara transparan dan adil.

"Ada beberapa tim yang terjun melakukan investigasi pada kasus ini, kita berharap setiap tim yang dibentuk tidak saling menegasikan dan justru saling melengkapi dari fokus masing-masing investigasi. Sehingga bebas kepentingan dan akhirnya benar-benar didapatkan hasil investasi nyata yang terbuka," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (28/10/2022).

Kurniasih mengatakan, saat ini prioritas investigasi adalah menemukan penyebab utama dari kasus gagal ginjal akut secara medis ini agar tidak lagi berjatuhan korban. Selepas itu, perlu ditelisik apa saja faktor penyebab utama kasus ini bisa terjadi apakah karena ada faktor kelalaian dan sebagainya.

"Saat ini yang perlu dilakukan adalah temukan penyebabnya agar tidak ada lagi kasus bertambah. Lalu bisa diselidiki kenapa penyebab itu bisa terjadi apakah karena kesengajaan, kelalaian atau sebagainya," tegas Kurniasih.

Kurniasih juga menyebut kasus gagal ginjal akut pada anak pernah terjadi pada 1998 saat ditemukan kasus kematian anak karena gagal ginjal akut di Haiti. Pada 1990 juga terjadi di Bangladesh dan pada 2006 juga terjadi di Indonesia. Semuanya dikonfirmasi karena keracunan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

"Data-data ini bisa menjadi salah satu bahan investigasi secara menyeluruh termasuk bahan baku obat dan bisa melibatkan lintas kementerian jika ada bahan-bahan yang berasal dari impor. Kita minta usut tuntas," kata Kurniasih.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Ada beberapa tim yang terjun melakukan investigasi pada kasus ini, kita berharap setiap tim yang dibentuk tidak saling menegasikan dan justru saling melengkapi dari fokus masing-masing investigasi. Sehingga bebas kepentingan dan akhirnya benar-benar didapatkan hasil investasi nyata yang terbuka,"

Aleg PKS Serukan agar RUU PPRT Menjadi RUU inisiatif DPR

KUTIPAN

Jakarta (01/11) --- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mendorong agar pemerintah juga dapat memberikan perhatian pada RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Rapat Paripurna 2 pada Selasa (1/11)

Netty menjelaskan bahwa perhatian terhadap pekerja rumah tangga juga harus dilakukan. Hal tersebut ia jelaskan merujuk pada kekerasan-kekerasan yang dialami selama ini oleh para pekerja.

"Beberapa waktu lalu kita lihat, betapa pekerja rumah tangga mengalami kekerasan dari majikannya. Dalam forum terhormat ini, saya mendorong agar kita juga memperhatikan RUU ini," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS ini juga menyebutkan bahwa pemerintah dinilai masih abai dalam membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dia menegaskan dan mengajak seluruh jajaran agar dapat bekerjasama untuk menetapkan RUU ini di masa sidang kedepannya.

"Kita memiliki utang peradaban lebih dari 18 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan ini masih terbengkalai," tegasnya.

"Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melalui forum ini mudah-mudahan kita semua bersepakat untuk menjadikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai RUU inisiatif DPR RI," tutupnya.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

“Perhatian terhadap pekerja rumah tangga juga harus dilakukan. Hal tersebut ia jelaskan merujuk pada kekerasan-kekerasan yang dialami selama ini oleh para pekerja. Beberapa waktu lalu kita lihat, betapa pekerja rumah tangga mengalami kekerasan dari majikannya. Dalam forum terhormat ini, saya mendorong agar kita juga memperhatikan RUU ini

Angka Putus Sekolah Masih Tinggi, **FRAKSI PKS: PR KEMEN-DIKBUD-RISTEK SANGAT BANYAK!**

Desain : Aditya Angga

Soal Guru Honorer, Aleg PKS: Rasanya Tak Mungkin Dihapus Sepenuhnya pada Tahun Depan

KUTIPAN

"Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari PP 48 Tahun 2005, yang sudah diganti dan direvisi. Faktanya, persoalan guru honorer belum selesai. Saya rasa, tidak mungkin kalau di tahun 2023 sudah tidak ada guru honorer", tegasnya.

Jakarta (03/11) -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyebut bahwa permasalahan guru honorer akan sulit diselesaikan dalam waktu cepat oleh Pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen GTK, dan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, pada Kamis (03/11).

"Masalah guru honorer adalah problematika yang tidak bisa selesai dengan hanya rekrutmen satu juta guru, atau kemudian dengan skema PPPK yang sekarang dilakukan", ujar Fikri Faqih.

Fikri pun ragu bahwa di tahun depan sudah tidak ada tenaga honorer, dalam hal ini, guru honorer.

"Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari PP 48 Tahun 2005, yang sudah diganti dan direvisi. Faktanya, persoalan guru honorer belum selesai. Saya rasa, tidak mungkin kalau di tahun 2023 sudah tidak ada guru honorer", tegasnya.

Menurutnya, diperlukan sinergitas dan koordinasi yang menyeluruh dari seluruh stakeholder Pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer.

"Kalau hanya menyelesaikan masalah secara sporadis begini, saya yakin tidak akan selesai. Perlu ditangani secara serius. Perlu tim dan koordinasi antar kementerian, Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, dan BKN", pungkasnya.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Masalah guru honorer adalah problematika yang tidak bisa selesai dengan hanya rekrutmen satu juta guru, atau kemudian dengan skema PPPK yang sekarang dilakukan",

Tingkat Putus Sekolah Tinggi, Aleg PKS: Banyak Putra Putri Bangsa Tidak Dapatkan Hak

KUTIPAN

Jakarta (03/11) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menyampaikan materi mengenai Identifikasi Anak Putus Sekolah dan Implementasi Wajib Belajar pada Webinar yang diadakan Bakrie Center Foundation.

Fahmy menyampaikan bahwa angka putus sekolah perlu diperhatikan karena banyaknya putra putri bangsa yang tidak mendapatkan hak Pendidikan.

"Membahas anak putus sekolah, kita dapatkan fakta dari 2016 sampai 2021, angka putus sekolah di Indonesia perlu kita perhatikan karena sejumlah putra putri bangsa tidak mendapatkan Pendidikan yang semestinya mereka dapat sesuai UUD 1945," ungkapnya.

Fahmy menambahkan bahwa sejak tahun 2017 (perkembangan Pendidikan) cenderung stagnan yang artinya jumlah yang putus sekolah tidak mengalami suatu perbaikan.

Ia menyampaikan bahwa dua faktor utama anak putus sekolah adalah kemiskinan dan bekerja, terutama anak pada tingkat SMP dan SMA. Hal tersebut dikarenakan karena mereka terpaksa untuk mencari uang.

"Studi yang dilakukan UNICEF, berjudul Global Initiative on out of School Children, untuk kasus di Indonesia tahun 2015, menemukan faktor yang menyebabkan putus sekolah adalah kemiskinan, daerah terpencil, akses Pendidikan kurang, dan sarana penyandang disabilitas yang kurang," jelas Fahmy.

Fahmy menambahkan perlu diadakannya sosialisasi yang lebih luas bahwa Pendidikan itu sangat penting baik untuk meningkatkan martabat keluarga maupun secara keseluruhan dalam konteks pentingnya kita sebagai bangsa.

Ia membahas juga mengenai program wajib belajar yang diadakan pemerintah. Program wajib belajar tentu berimplikasi pada besaran anggaran yang disediakan.

"Alokasi anggaran Kemendikbud Ristek untuk program wajib belajar 12 tahun, menunjukkan tren penurunan yang cukup besar, penurunan anggaran terjadi signifikan pada tahun 2021," ujarnya.

Fahmy menambahkan bahwa alokasi anggaran Kemendikbud Ristek untuk program wajib belajar 12 tahun hanya 14 persen. Angka ini jauh di bawah untuk program dukungan manajemen yang mencapai 26 persen.

Ia mengatakan bahwa masih lemahnya dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kapasitas dari kepemimpinan daerah untuk mengatasi anak tidak sekolah, perlu ditingkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed
Anggota Komisi X DPR RI

"Studi yang dilakukan UNICEF, berjudul Global Initiative on out of School Children, untuk kasus di Indonesia tahun 2015, menemukan faktor yang menyebabkan putus sekolah adalah kemiskinan, daerah terpencil, akses Pendidikan kurang, dan sarana penyandang disabilitas yang kurang,"

Formasi 1 Juta ASN P3K Gagal, Aleg PKS: Jangan Banyak Janji Jika Perencanaan Tak Matang

KUTIPAN

Jakarta (03/11) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal menyayangkan formasi 1 juta ASN P3K yang gagal mencapai target, Pemerintah dinilai lalai dalam perencanaannya.

Hal tersebut disampaikan Mustafa Kamal dalam rapat sidang Komisi X pada Kamis (03/11).

Kamal menjelaskan bahwa formasi 1 juta ASN P3K terlalu mengiming-imingkan rakyat mengenai formasi ASN P3K terhadap honorer tetapi tanpa disertai dengan perencanaan yang matang.

"Ini sudah distatement 1 juta guru P3K akan diangkat di negeri ini, lalu kemudian yang terjadi adalah tidak sesuai target. Permasalahan kita tidak perlu terjadi kalau perencanaannya matang, jadi kalau ada kesalahan di sini maka yang harus dikoreksi adalah perencanaannya," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya memahami pentingnya peran otonomi daerah dalam implementasi program-program pusat agar dapat terkoordinasi dengan baik.

"Seharusnya kita memahami otoritas otonomi daerah kita. Sekarang di era reformasi otonomi daerah memiliki peran besar dalam program-program pemerintah pusat, jadi pemerintah pusat harus sadar akan hal itu. Kita panggil kepala daerah, konsolidasi dulu dengan menteri keuangan, panggil juga kebutuhannya, kordinasi dengan kemendagri dan koordinasikan perundang-undangannya seperti apa," tegasnya.

Kamal juga sangat menyayangkan pemerintah yang terlalu cepat mengeluarkan statement tersebut kepada rakyat. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah harus benar-benar melakukan renungan karena perencanaan program yang gagal ini.

"Dan yang paling perih lagi perencanaannya belum matang tapi sudah diumumkan dan anehnya lagi permasalahan ini telah berperiode lalu lalu, kita berharap dengan P3K adalah solusi tapi tidak," ujarnya.

"Kita benar-benar harus renungan semua ini, bagaimana bisa legislator-legislator yang berpuluh-puluh tahun namun begini perencanaannya. Saya merasa semua perencanaan sia-sia, karena semua tidak dimatangkan. Bagaimana kerja kita ini ? " tutup Mustafa Kamal.

H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
Anggota Komisi X DPR RI

'Formasi 1 juta ASN P3K terlalu mengiming-imingkan rakyat mengenai formasi ASN P3K terhadap honorer tetapi tanpa disertai dengan perencanaan yang matang. Ini sudah distatement 1 juta guru P3K akan diangkat di negeri ini, lalu kemudian yang terjadi adalah tidak sesuai target. Permasalahan kita tidak perlu terjadi kalau perencanaannya matang, jadi kalau ada kesalahan di sini maka yang harus dikoreksi adalah perencanaannya

Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Harus Kendalikan Inflasi, Daya Beli Masyarakat Makin Anjlok

KUTIPAN

Jakarta (31/10) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyebut tingginya inflasi pangan makin mengancam daya beli masyarakat.

"Kenaikan yang tinggi pada pangan makin mengkhawatirkan masyarakat, tercatat inflasi akan terdorong mencapai 6-7 persen jika tak dapat dikendalikan pemerintah," ujarnya di komplek DPR RI, Jakarta (31/10).

Ecky menyebut harga-harga pangan naik cukup tajam pada akhir Oktober 2022 dibandingkan Oktober tahun lalu, kenaikan seperti beras naik 5%, daging sapi 7,5%, telur sebesar 23%, minyak goreng naik 10,7%, cabai rawit 23,3% dan pangan lainnya terpantau naik.

"Jika ini tidak terkendali dan tidak diredam, pemulihan ekonomi akan terhambat, inflasi merangkak naik sehingga daya beli turun," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyatakan bahwa selain kenaikan harga pangan, ancaman inflasi juga dari pelemahan rupiah, karena setiap pelemahan 1% rupiah akan berkontribusi atas 0,4 basis poin inflasi.

"Jika kita hitung sejak awal tahun rupiah sudah melemah sebanyak 8,87% , pemerintah dan BI seharusnya bekerja lebih keras," ungkapnya.

Legislator PKS asal Cianjur ini mendesak pemerintah fokus menjelang akhir tahun ini untuk menangani inflasi dan dampak-dampaknya.

"Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari sebelumnya 124,7 menjadi 117,2, artinya terjadi penurunan signifikan pada keyakinan konsumen, situasi ini tidak baik karena kita akan menghadapi tantangan lebih berat tahun depan terkait ketidakpastian ekonomi global," katanya.

H. ECKY AWAL MUCHARAM
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

> “harga-harga pangan naik cukup tajam pada akhir Oktober 2022 dibandingkan Oktober tahun lalu, kenaikan seperti beras naik 5%, daging sapi 7,5%, telur sebesar 23%, minyak goreng naik 10,7%, cabai rawit 23,3% dan pangan lainnya terpantau naik."Jika ini tidak terkendali dan tidak diredam, pemulihan ekonomi akan terhambat, inflasi merangkak naik sehingga daya beli turun

Komisi XI FPKS: Jika Resesi Ekonomi Dunia Tak Diantisipasi, Indonesia Bisa Terdampak Parah

KUTIPAN

Jakarta (28/10) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyebut bahwa Indonesia masuk 15 negara Asia terdampak resesi ekonomi global.

"Sri Lanka menjadi negara urutan pertama negara yang memiliki kemungkinan mengalami resesi hingga 85 persen, sedangkan Indonesia berada diperingkat ke 14 negara menurut data Bloomberg, dengan probability krisis sebesar 3 persen," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, pada Kamis (28/10).

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengungkapkan bahwa tidak tertutup kemungkinan ke depan risikonya untuk Indonesia akan terus meningkat, mengingat kombinasi tingginya tingkat inflasi dan suku bunga menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi (stagflasi) ada efek rambatan kepada ekonomi domestik.

"Bahkan BI sudah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya mencapai 4,7 - 5,5 persen menjadi turun ke 4,6 hingga ke 5,2 persen," ujarnya.

Anis menyebut bahwa dengan proyeksi resesi akan melanda Amerika dan merembet pada Negara lain akibat kenaikan suku bunga secara agresif untuk menekan inflasi, mata uang rupiah akan kewalahan.

"Cadangan devisa Indonesia terus tergerus, September tahun lalu mencapai 146,9 miliar USD dan September 2022 hanya 130,8 miliar USD, artinya BI susah payah menjaga volatilitas nilai tukar rupiah agar stabil," katanya.

Menurut Aleg Perempuan PKS ini pemerintah harus mengendalikan laju inflasi dengan menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.

"Selain itu dari sisi fiskal pemerintah perlu menjaga efektifitas dan efisiensi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya dengan prioritas belanja yang berkualitas dan menunda proyek ambisius seperti pembangunan Ibukota baru disaat resesi ekonomi global," serunya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mengkuatirkan jika pemerintah terus mengejar proyek proyek mercusuar yang komponen impornya tinggi dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat, Indonesia akan terdampak parah akibat resesi ekonomi global.

"Perlu diingat pula total utang pemerintah kembali naik per 30 September 2022, menurut catatan terakhir sebesar Rp 7.420 triliun, total utang naik sekitar 2,54 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 7.236,61 triliun, jadi pemerintah harus menjaga rasio utang yang terkendali dan memprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak," ujarnya.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Selain itu dari sisi fiskal pemerintah perlu menjaga efektifitas dan efisiensi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya dengan prioritas belanja yang berkualitas dan menunda proyek ambisius seperti pembangunan Ibukota baru disaat resesi ekonomi global,"

PROGRAM UNGGULAN
FRAKSI PKS DPR RI

Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Menghadirkan tokoh PKS, tokoh bangsa dan pakar yang terkemuka.

Komisi III FPKS akan Terus Kawal Isu Hukum dan Pemberantasan Narkoba

KUTIPAN

Jakarta (02/11) --- Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyampaikan keterangan dalam PKS Legislative Report (PLR) saat menghadiri acara Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa, (01/11/2022).

Setelah melalui masa reses, Adang Daradjatun yang merupakan mantan Wakapolri ini menuturkan menerima beragam aspirasi yang ia dapatkan di Dapilnya, yakni daerah Jakarta Utara.

"Di daerah Jakarta Utara, daerah dapil saya. Banyak tempat anak muda sering kumpul-kumpul malam dan juga ada tempat tertentu yang sering mempergunakan narkotika," ujar Adang.

"Kemarin saya juga membawa BNN DKI dan itu sudah kami laporkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk menjadi perhatian, karena apapun juga aspirasi dan harapan masyarakat itu harus disampaikan," tambah ia.

Dalam penjelasannya, Komisi III akan terus fokus dalam menjalankan tugas pada ruang lingkupnya, yakni hukum, HAM dan juga keamanan. Salah satunya yakni pengawasan pada kasus-kasus yang sedang terjadi di kepolisian dan juga beberapa lembaga lainnya.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id

Drs. H. ADANG DARADJATUN
Anggota Komisi III DPR RI

"Kita memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sebagai Anggota DPR, yakni kasus-kasus terakhir di kepolisian dan juga di beberapa lembaga lainnya yang merupakan mitra kerja komisi tiga itu kita tanyakan, yang lagi ramai ya masalah di kepolisian dan hakim yang ditangkap dan sebagainya,"

Andi Akmal Pasluddin: Stop Ketergantungan Impor Kedelai, Pemerintah Harus Dorong Produktivitas Petani Lokal!

Baru-baru ini, Pemerintah melakukan importasi 350 ribu ton kedelai. Importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada ini akibat tingginya harga kedelai. Semestinya, harganya dibawah Rp10.000/kg, tetapi saat ini, harga kedelai sudah menyentuh angka Rp13.000/kg.

Angka yang sangat tinggi, sehingga memberatkan bagi masyarakat di negeri ini, khususnya para pengrajin tahu dan tempe. Mereka pun pada akhirnya harus memutar otak guna mengakali harga yang tak terkendali.

Tanpa banyak basa-basi, impor pun dipilih Pemerintah sebagai solusi. Solusi jangka pendek, yang sebenarnya tak pernah menyelesaikan akar masalah. Sayangnya, setiap tahun, pola yang sama terus digunakan. Lagu lama. Padahal, pengendalian harga kedelai dapat dilakukan dengan manajemen stok yang baik.

Ya, tampaknya, kedaulatan dan kemandirian pangan di negeri ini masih jauh dari genggaman. Diperlukan langkah yang lebih serius dari Pemerintah guna menjaga stabilitas stok dan harga pangan, sekaligus memaksimalkan potensi produksi dalam negeri. Setidaknya, dimulai dari komoditas kedelai yang selalu impor tiap tahunnya.

Humas Fraksi PKS DPR RI melakukan wawancara dengan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM., untuk memperdalam bahasan soal isu kedelai ini. Simak keterangan-keterangan dari Anggota DPR asal Sulawesi Selatan berikut.

Bagaimana kondisi komoditas kedelai di Indonesia sekarang?

Indonesia merupakan negara terbesar dengan tingkat konsumsi kedelai tertinggi setelah China. Kedelai merupakan salah satu kebutuhan vital dan menjadi komoditas strategis di Indonesia setelah beras dan jagung. Dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, maka perlu adanya upaya untuk untuk mendukung ketersediaan kedelai yang mencukupi segenap bangsa negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha dari berbagai komponen, mulai dari lahan yang produktif, kualitas pertanian dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga mampu memproduksi dengan optimal.

Sejak dahulu hingga sekarang, permasalahan produksi kedelai seolah menjadi masalah yang sentral yang tak bertemu titik terang. Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kaya akan sumber daya namun kekayaan yang dimilikinya tersebut nyatanya masih belum mampu dioptimalkan. Sebaliknya, Indonesia hingga hari ini ternyata masih menjadi negara dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terkhusus terhadap impor ked elai, yakni berada pada angka 93%. Tingkat kebutuhan kedelai yang seharusnya 2,9 juta ton hanya mampu disediakan 200 ribu ton. Ketersediaan yang sangat rendah tersebut merupakan faktor utama pemerintah menempuh membuka keran impor, selain karena kualitas dan mutu yang

berbeda dengan kualitas produksi petani lokal.

Kedelai impor yang meningkat mengakibatkan banyak pelaku konsumen kedelai merasa terbebani dan bahkan gulung tikar. Menurut Bapanas, harga kedelai saat ini bahkan menyentuh harga Rp 14.000 per kilogram, harga tersebut merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan bibit kedelai dan ketidakpastian pasar membuat para petani kedelai menjadi dilema. Ketidakpastian harga pasar membuat hasil produksi para petani menjadi sia-sia karena tidak adanya Harga Pokok Penjualan atau HPP yang pasti dari Kementrian Perdagaan ataupun Kementerian Petanian. Kondisi tersebut membuat para petani-petani berhenti memproduksi yang berakibat pada penurunan tingkat produksi kedelai itu sendiri.

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanganan komoditas kedelai?

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 yang di dalamnya menetapkan cadangan pangan pemerintah terdiri atas 11 komoditas. Kendati menetapkan 11 komoditas, Pasal 3 ayat (6) dalam perpres itu menyatakan tahap pertama penyelenggaraan CPP untuk beras, jagung, dan kedelai.

> Tanpa banyak basa-basi, impor pun dipilih Pemerintah sebagai solusi. Solusi jangka pendek, yang sebenar-nya tak pernah menyele-saikan akar masalah. Sayangnya, setiap tahun, pola yang sama terus digunakan. Lagu lama. Padahal, pengendalian harga kedelai dapat dilakukan dengan manajemen stok yang baik.

Dalam pasal 11, Pemerintah menyalurkan CPP untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, serta keadaan darurat.

Dalam penerapannya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan gencar dalam menyediakan kesediaan pangan negara. Namun sayangnya, permasalahan inti dari kelangkaan pangan khususnya kedelai belum mampu diatasi. Indonesia dengan penduduk 240 juta memiliki tingkat kebutuhan kedelai yang tinggi, namun belum mampu memproduksi kebutuhan penduduk dengan produksi dalam negeri itu sendiri. Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produktivitas petani, dengan meningkatkan kualitas serta mutu produksi pertanian masih jauh dari kata cukup dari pencanangan pemerintah tentang swasembada pangan. Alokasi subsidi bagi para pelaku kedelai hanya mampu menyelesaikan permasalahan secara instan dan tidak bisa secara berkelanjutan, inti dari permasalahan belum nampak dijalankan dalam kerja-kerja kebijakan pemerintah.

Bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan meningkatkan produksi, kualitas dan meminimalisir kelangkaan kedelai di Indonesia?

Permasalahan inti dari kedelai secara sederhana adalah, karena ketidakmampuan memproduksi dalam negeri. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu adanya Langkah strategis mengenai peningkatan produksi, kualitas dll. Dalam soal pangan, khususnya kedelai, banyak pihak dan lembaga yang terlibat. Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sinergi dan Kerjasama antara stakeholder agar mampu berkordinasi baik itu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog dsb harus ditingkatkan untuk berevaluasi dan memberikan solusi baru terkait permasalahan inti dari kelangkaan kedelai.

Impor kedelai seharusnya bisa diminimalisir karena kondisi geografis Indonesia yang mendukung untuk iklim pertanian. Dukungan pemerintah dalam program bantuannya kepada petani-petani untuk memberikan bibit-bibit kedelai berkualitas sangat diperlukan demi pengoptimalan produksi, meningkatkan kualitas kedelai. Selain itu, menentukan HPP kedelai kepada para petani sangat perlu untuk memberikan kepercayaan diri kepada pada petani untuk memproduksi kedelai. Menentukan HPP juga sangat perlu dilakukan agar hasil produksinya tidak menjadi boomerang jurang kerugian bagi mereka sendiri.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif

Hakikat kepahlawanan adalah kontribusi dan dedikasi. Karya nyata lebih esensi daripada gelar pahlawan itu sendiri

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Terima Kasih PAHLAWAN

HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022

HARI PAHLAWAN 2022
PAHLAWANKU TELADANKU

OLEH

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Wafatnya 2.087 tenaga kesehatan karena pandemi Covid-19 adalah kehilangan besar. Sebab hari ini rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat timpang. Saat ini jumlah dokter di Indonesia sekitar 140 ribu. Sementara kebutuhan ideal berdasarkan rasio WHO adalah dibutuhkan 270 ribu dokter di Indonesia.

Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka! | Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. | Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. | Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar..! Allahu Akbar..! Allahu Akbar..!

Merdeka!!!
Itulah petikan menyejarah dari Bung Tomo, yang memberikan semangat juang kepada arek-arek Surabaya, 10 November 1945. Pidato Bung Tomo ini menggerakkan jiwa pemuda-pemuda revolusi untuk tegak mempertahankan usia kemerdekaan yang baru seumur jagung.

Bung Tomo menggambarkan dengan sempurna tentang makna menjadi pejuang. Mereka ini, tidak pernah terpikir untuk mendapat gelar pahlawan. Tidak pernah terbersit bahwa perjuangan mereka akan terus dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Yang Bung Tomo dan arek-arek Surabaya lakukan adalah memilih berjuang. Lebih baik hancur lebur daripada kemerdekaan kembali dirampas. Rela berkorban adalah ciri utama mereka. Ditambah keyakinan yang kuat bahwa yang mereka lakukan adalah kebaikan dan kebenaran.

Hari ini dan ke depan, rasanya sifat rela berkorban dan yakin atas jalan yang dipilih sebagai jalan kebenaran adalah hal yang harus ditumbuhkan. Sebab itu adalah ciri-ciri utama sifat kepahlawanan.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Menghargai Pahlawan Kesehatan ... (2)

Wafatnya 2.087 tenaga kesehatan karena pandemi Covid-19 adalah kehilangan besar. Sebab hari ini rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat timpang. image : Kompas.com

Menghargai Pahlawan Kesehatan

Tidak perlu menunggu masa depan, hari ini kita sudah disuguhkan tindakan-tindakan kepahlawanan. Seluruh bangsa baru saja mengalami cobaan yang cukup berat, pandemi Covid-19.

Semua tanpa kecuali mengalami kesulitan yang berat. Namun, di tengah semua orang harus berdiam diri, menjauhi segala kemungkinan pusat penularan ada orang-orang yang justru maju ke depan. Mereka adalah para tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan dengan sadar tetap berjuang di pusat penularan, dengan tata laksana yang melelahkan dan berat baik fisik dan mental, risiko penularan paling besar dan meninggalkan keluarga yang dicintainya untuk berjuang di medan perang melawan Covid-19.

Para pahlawan kesehatan ini pun terkena impaknya. Ratusan dari mereka gugur saat bertugas. Data Lapor Covid-19 mengungkapkan, ada 2.087 tenaga kesehatan yang meninggal per 21 April 2022. Mayoritas dari mereka, 751 orang adalah para dokter.

Menyusul kemudian 670 perawat, 398 bidan, 51 ahli teknologi laboratorium medis, 58 apoteker, 46 dokter gigi, 12 petugas rekam radiologi dan 8 terapis gigi turut wafat dalam pandemi Covid-19.

Belum berhenti disini, masih ada 7 orang sanitarian, 5 tenaga farmasi, 4 petugas ambulans, 3 tenaga elektromedik dan 2 orang epidemiolog yang meninggal. Sisanya ada 80 tenaga kesehatan lain yang meninggal karena Covid-19.

Wafatnya 2.087 tenaga kesehatan karena pandemi Covid-19 adalah kehilangan besar. Sebab hari ini rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat timpang. Saat ini jumlah dokter di Indonesia sekitar 140 ribu. Sementara kebutuhan ideal berdasarkan rasio WHO adalah dibutuhkan 270 ribu dokter di Indonesia.

Maka kehilangan tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup besar semakin melebarkan disparitas rasio jumlah tenaga kesehatan di Indonesia. Sebuah kehilangan besar bagi Indonesia yang sangat tertinggal jauh dari sisi rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.

Di sisi lain, melahirkan tenaga kesehatan harus melalui tingkat pendidikan yang tidak mudah dan panjang. Maka proses regenerasi harus dijalankan dalam waktu yang tidak singkat. Pada kasus kekurangan dokter dengan menghitung laju lulusan kedokteran, maka dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mengejar ketertinggalan jumlah rasio dokter. Itupun dengan tidak menghitung faktor lain seperti wafatnya tenaga kesehatan.

Sebab itu, wafatnya tenaga kesehatan bukan sekadar angka. Ini adalah sebuah persoalan serius sebab taruhannya adalah kualitas kesehatan nasional yang terancam. Bangsa ini seharusnya berduka lalu melakukan instrospeksi mendalam.

Tenaga kesehatan yang telah berkorban hingga nyawa telah menyelesaikan amanahnya dengan paripurna. Maka tugas generasi selanjutnya untuk melahirkan tenaga kesehatan baru dengan spirit yang sama. Rela berkorban, yakin kepada kebenaran dan peduli dengan masa depan generasi.

Selain itu bentuk penghargaan kepada tenaga kesehatan yang telah berjuang dengan memastikan hak-haknya ditunaikan. Memberikan apresiasi terutama bagi mereka tenaga kesehatan honorer yang

KUTIPAN

> Tenaga kesehatan yang telah berkorban hingga nyawa telah menyelesaikan amanahnya dengan paripurna. Maka tugas generasi selanjutnya untuk melahirkan tenaga kesehatan baru dengan spirit yang sama. Rela berkorban, yakin kepada kebenaran dan peduli dengan masa depan generasi.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Menghargai Pahlawan Kesehatan ... (tamat)

Pembukaan kembali beberapa negara penempatan setelah pandemi Covid-19 melandai menjadi salah satu momentum kebangkitan bagi penempatan PMI. (Image Istimewa)

telah berjuang dan memberikan manfaatnya. Evaluasi rencana penghapusan tenaga honorer. Berikan afirmasi tenaga kesehatan agar mudah diangkat menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ini sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang rela berjuang, bersiap untuk mengorbankan segalanya untuk mengatasi pandemi. Negara harus hadir untuk tenaga kesehatan agar hidup mereka semakin berkualitas sehingga kiprahnya di bidang kesehatan bisa semakin luas manfaatnya terutama untuk publik.

Melidungi Pahlawan devisa*

Kita juga sudah mendengar sejak lama tentang istilah pahlawan devisa. Istilah ini ditujukan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut data Bank Indonesia (BI), pada kuartal II 2022 remitansi atau pengiriman uang pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri ke Tanah Air mencapai US$2,39 miliar.

Jumlah tersebut meningkat 1,82% dibanding kuartal sebelumnya, serta tumbuh 4,87% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu.

Dari data ini sudah ada kebangkitan dari sisi remitansi PMI yang terbukti turut menggerakkan ekonomi nasional. Sebab angka remitansi para pahlawan devisa ini hanya kalah dari sektor Minyak dan Gas.

Pembukaan kembali beberapa negara penempatan setelah pandemi Covid-19 melandai menjadi salah satu momentum kebangkitan bagi penempatan PMI.

Sebagai kelompok yang mendapatkan gelar pahlawan devisa, tentu negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Manfaat besar dari hadirnya PMI harus diiringi dengan perlindungan yang ekstra bagi PMI. Perlindungan ini harus dilakukan sejak dari sebelum keberangkatan, saat proses keberangkatan, saat berada di negara penempatan hingga kelupangan kembali ke Tanah Air.

Beberapa bulan terakhir kita disuguhkan dengan masih banyaknya calon PMI jalur nonprosedural yang berhasil digagalkan berangkat. Selain yang digagalkan, PMI nonprosedural sudah ada yang menjadi korban dugaan perdagaangan manusia di beberapa negara Asia Tenggara. Jumlahnya banyak dan berpola.

Artinya mafia penempatan PMI nonprosedural masih bergentayangan di Tanah Air. Pemerintah juga sudah membentuk gugus tugas Tidan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga dan berada di pusat hingga daerah. Namun dengan kekuatan yang cukup besar nampaknya belum ada perlindungan dari bahayanya mafia PMI nonprosedural yang masih berkeliaran.

Sebab itu, tidak ada toleransi untuk bisa memberantas mafia PMI nonprosedural sampai ke akarnya. Perlindungan bagi PMI yang sudah ada di negara penempatan juga tak kalah pentingnya.

Saat teman-teman sudah menjadi Purna PMI, tanggung jawab juga tidak boleh dilepaskan. Pemberdayaan bagi purna PMI agar bisa membangun daerah asal perlu pendampingan, dukungan dan ekosistem yang suportif.

Maka hari pahlawan tahun ini sangat relevan untuk memberikan tribut kepada mereka para pahlawan kesehatan dan pahlawan devisa kita.

Selamat Hari Pahlawan!!

KUTIPAN

> Sebagai kelompok yang mendapatkan gelar pahlawan devisa, tentu negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Manfaat besar dari hadirnya PMI harus diiringi dengan perlindungan yang ekstra bagi PMI. Perlindungan ini harus dilakukan sejak dari sebelum keberangkatan, saat proses keberangkatan, saat berada di negara penempatan hingga kelupangan kembali ke Tanah Air.

Mencari Pahlawan Penegakan Hukum

OLEH

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

Peringatan hari Pahlawan 10 November 2022 dihadiahi dengan ditetapkan tersangka baru Hakim Agung dalam kasus OTT Sudrajat Dimyati. Padahal persoalan pembunuhan anggota Polisi oleh salah satu pimpinan Polisi Bernama Ferdi Sambo masih terus membayangi layar televisi Indonesia. Walhasil, realitas horor tentang budaya hukum di Indonesia telah merubah cara bangsa Indonesia dalam bernegara.

Fenomena Gunung Es

Menurut Edward Twitchell Hall, budaya dimetaforakan sebagai gunung es (Ice Berg Theory). Puncak gunung es merupakan presentasi 10% yang dapat dilihat nyata oleh publik. Adapun hal-hal yang tidak nampak dibawah permukaan laut biasanya berbobot 90% dalam sebuah kebudayaan. Bagian dalam gunung es merupakan representasi budaya organisasi, yang terdiri dari sistem nilai, keyakinan, falsafah, norma, peraturan dan cara beripikir dalam sebuah organisasi.

Fenomena ditetapkannya Hakim Agung dan Petinggi Kepolisian sebagai tersangka kasus berat merupakan pucuk gunung es yang menyingkap budaya hukum yang sedang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Ice Berg Theory, penampakan kasus Sudrajat Dimyati dan Ferdi Sambo menunjukkan buruknya sistem nilai dan organisasi penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini menandakan, apa yang mungkin terjadi dalam tubuh Mahkamah Agung dan Kepolisian bisa lebih besar dan lebih buruk dari pada yang ditampilkan oleh kasus Sudrajat Dimyati dan Ferdi Sambo.

Budaya hukum yang dinampakkan saat ini memberikan pesan kepada anggota di luar institusi penegakkan hukum. Cara hidup, perilaku, kepribadian, gaya koruptif dan sewenang-wenang memberikan pengaruh kepada anggota dan orang-orang yang ada diluar organisasi untuk berperilaku dengan cara demikian. Pesan

Mencari Pahlawan Penegakan Hukum ... (2)

ini yang berbahaya; Masyarakat pada umumnya bisa saja berpikir bahwa hanya dengan cara menyuap dan membeking polisi baru akan dapat keadilan. Jika perilaku ini terus diyakini, bisa jadi perilaku koruptif tersebut dapat menjadi adat istiadat penegakkan hukum di Indonesia.

Kebiasaan

Sebuah perilaku akan menjadi kebiasaan (habits) jika dilakukan berulang-ulang. Dollard dan Miller menyatakan bahwa kebiasaan lahir dari stimulus respon yang bertahan lama dalam kepribadian. Secara sederhana, kebiasaan dihasilkan dari pengulangan yang ekstensif dalam diri seseorang.

Hal-hal yang ditampakkan dalam wajah penegakkan hukum saat ini memberikan respon kepada masyarakat dengan berbagai pengaruh. Melalui persidangan non-stop Sambo yang ditampilkan di layar televisi nampak memberikan stimulus dalam kepribadian masyarakat tentang betapa rumitnya menemukan kebenaran dan mudahnya rekayasa kejahatan dilakukan.

Pengulangan yang ditampilkan tersebut, bisa saja terserap- sedikit demi sedikit, pada orang-orang tua, muda, kaya dan miskin untuk berubah menjadi koruptif dan penuh rekayasa seperti Sambo. Begitupun dengan kasus korupsi di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Hakim Agung, bisa saja kasus ini memberikan respon budaya suap menyuap dalam berbagai tingkat pengadilan.

KUTIPAN

Fenomena ditetapkannya Hakim Agung dan Petinggi Kepolisian sebagai tersangka kasus berat merupakan pucuk gunung es yang menyingkap budaya hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Ice Berg Theory, penampakan kasus Sudrajat Dimyati dan Ferdi Sambo menunjukkan buruknya sistem nilai dan organisasi penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini menandakan, apa yang mungkin terjadi dalam tubuh Mahkamah Agung dan Kepolisian bisa lebih besar dan lebih buruk dari pada yang ditampilkan oleh kasus Sudrajat Dimyati dan Ferdi Sambo.

Atomic Habits

Parahnya lagi, kebobrokan ini selalu saja dicoba untuk dijustifikasi; "mungkin saja ini hanya oknum!". Hal inilah yang justru paling berbahaya yakni dengan membiasakan hal-hal buruk kecil menjadi hal yang normal. Konsep inilah yang disebut oleh James Clear sebagai atomic habits.

Kebiasaan untuk meremehkan penyimpangan dan menganggapnya bukan sebagai hal penting merupakan bentuk kebiasaan yang sangat berbahaya. Menurut James Clear, penyimpangan kecil sebenarnya akan mengakumulasikan ratusan dan ribuan keputusan kecil yang membawa pengaruh luar biasa. Oleh karenanya, menganggap perkara penegakkan hukum ini sebagai isu biasa, kasuistis yang dilakukan oknum, sama saja dengan menyepelekan kebiasaan buruk ini.

Hingga saat ini, berbagai petinggi negara belum memberikan respon luar biasa terhadap runtuhnya kebudayaan hukum ini. Pendekatan hukum khusus, upaya perbaikan budaya hukum dan counter culture yang dilakukan penting dilakukan untuk memberikan pesan penting kepada warga negara; "budaya hukum perlu diselamatkan!" (Image : Istimewa)

Hingga saat ini, berbagai petinggi negara belum memberikan respon luar biasa terhadap runtuhnya kebudayaan hukum ini. Pendekatan hukum khusus, upaya perbaikan budaya hukum dan counter culture yang dilakukan penting dilakukan untuk memberikan pesan penting kepada warga negara; "budaya hukum perlu diselamatkan!" Pemberian respon ini penting untuk memberikan stimulus pada

Mencari Pahlawan Penegakan Hukum ... (tamat)

Saat ini mungkin kita tidak perlu para pahlawan tanpa pamrih karena kriteria itu terlalu berat. Cukup para penegak hukum yang bekerja bukan dengan obsesi keuntungan pribadi semata. (Image : Istimewa)

psikologi warga negara, bahwasanya hal tersebut bukanlah yang wajar dan perlu diperbaiki.

Pahlawan

Pada peringatan hari pahlawan 2022 ini saat yang tepat untuk melakukan refleksi mendalam mengenai jiwa-jiwa kepahlawanan. Konon, kata pahlawan dalam Bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari Bahasa Arab dari kata "pahala". Pahala merupakan ganjaran yang didapat manusia akibat dari perbuatan baiknya, ganjaran dari Tuhan bukan ganjaran dari manusia

Inti dari unsur kepahlawanan adalah pengorbanan tanpa pamrih. Para pahlawan sudah melupakan balasan materalis dari setiap perbuatan baiknya. Para pahlawan sudah melewati batas obsesi kebutuhan harta benda dan kekuasaan sebagai pamrih dari perbuatan baiknya. Bahkan diri sendiri harus dikorbankan demi cita-cita kebaikan, bukan cita-cita kebaikan pribadi tapi kebaikan bagi orang banyak.

Melihat fenomena mengkhawatirkan di institusi penegakan hukum seperti digambarkan di awal tulisan ini, nampaknya kita merindukan para pahlawan. Orang yang mengurusi penegakan hukum dan penjaga keamanan warga bukan dengan motivasi materialistis belaka. Aparat Penegakan hukum dan penjaga keamanan masyarakat dengan motivasi memperkaya diri dan keuntungan materil lainnya sudah dianggap wajar. Sekarang ini mulai banyak orang yang ditangkap aparat baik di jalan maupun operasi penertiban lainnya merasa itu semua bukan demi ketertiban umum. Perasaan yang timbul, ini untuk memberi makan para penegak hukum.

Saat ini mungkin kita tidak perlu para pahlawan tanpa pamrih karena kriteria itu terlalu berat. Cukup para penegak hukum yang bekerja bukan dengan obsesi keuntungan pribadi semata. Mendapat balasan materil atas pelaksanaan tugasnya adalah wajar, tapi bukan keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan warga. Jangan sampai ada anggapan bahwa semakin banyak pelanggaran semakin untung para penegak hukum.

Jiwa kepahlawanan ini sejatinya selalu dirindukan oleh semua orang. Hilangnya jiwa kepahlawanan pada aparat penegak hukum menjadikan impian keadilan diimaginasikan pada Batman, Superman dan kawanan The Avengers. Seolah-olah ilusi mengenai keadilan hanya dapat ditemukan pada tokoh-tokoh fiktif. Alhasil, masyarakat hanya dapat berharap pada ilusi fiksi dalam penerapan hukum karena sudah putus asa dengan yang nyata. Wallahualambishoab.

KUTIPAN

> Inti dari unsur kepahlawanan adalah pengorbanan tanpa pamrih. Para pahlawan sudah melupakan balasan materalis dari setiap perbuatan baiknya. Para pahlawan sudah melewati batas obsesi kebutuhan harta benda dan kekuasaan sebagai pamrih dari perbuatan baiknya. Bahkan diri sendiri harus dikorbankan demi cita-cita kebaikan, bukan cita-cita kebaikan pribadi tapi kebaikan bagi orang banyak.

Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan
Fraksi PKS DPR RI
fraksipksdprri
@fpksdprri
fraksi.pks.id

Konsolidasi Perempuan PKS, Anis Byarwati: Tetap Semangat dan Jaga Soliditas demi Jaktim Lebih Baik

KUTIPAN

Jakarta (27/10) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1 Jakarta Timur, Anis Byarwati menghadiri acara Konsolidasi Anggota Pelopor Perempuan PKS Jakarta Timur, yang diselenggarakan oleh Bidang Kaderisasi DPD PKS Jakarta Timur, yang bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Bersama Ketua DPD PKS Jakarta Timur, Ikrar Aulia, dan Bidang Kaderisasi [BK] DPD PKS Jakarta Timur, Dian Purwita Handayani, serta seluruh anggota pelopor perempuan Jakarta Timur dari zona timur dan selatan yang hadir, Anis mengikuti rangkaian acara in door dan out door hingga selesai.

Dengan mengangkat tema 'Solid, Dinamis, Smart, dan Semangat' acara ini bertujuan untuk memperkuat soliditas anggota PKS Jakarta Timur, menyiapkan ruhiyah dan mental yang kokoh serta jasadiyah jasmani yang kuat.

Acara ini terselengagara juga dalam rangka meningkatkan capacity building para anggota pelopor perempuan PKS Jakarta Timur dalam menyongsong tahun kemenangan 2024.

Dengan penuh semangat Anggota Komisi XI DPR RI itu membaur dan mengikuti rangkaian acara in door dan out door yaitu outbond hingga akhir acara.

Hal ini, memberikan kebahagiaan, semangat dan keteladan bagi semua peserta yang hadir.

Dalam closing statemenya, Anis yang juga sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan menyampaikan, bahwa acara ini merupakan sarana meningkatkan kembali kekuatan dan semangat para anggota perempuan PKS.

"Apa yang kita dapatkan dari rangakaian kegiatan hari ini, dari pagi hingga siang hari yang cukup melelahkan, namun menghadirkan kebahagiaan dan semangat, bisa kita ambil banyak sekali hikmah dan pelajaran, yang bisa kita terapkan dalam kerja-kerja dakwah dan kepartaian kita. Tetap semangat, tetap solid, dan terus kita tingkatkan ukhuwah diantara kita menuju Jakarta Timur Labih Baik" tegas Anis.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Apa yang kita dapatkan dari rangakaian kegiatan hari ini, dari pagi hingga siang hari yang cukup melelahkan, namun menghadirkan kebahagiaan dan semangat, bisa kita ambil banyak sekali hikmah dan pelajaran, yang bisa kita terapkan dalam kerja-kerja dakwah dan kepartaian kita. Tetap semangat, tetap solid, dan terus kita tingkatkan ukhuwah diantara kita menuju Jakarta Timur Labih Baik"

Launching Universitas Darunnajah Jakarta, HNW: Lanjutkan Semangat Bapak Bangsa Siapkan SDM Unggul

KUTIPAN

Jakarta (07/11) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersyukur dan mendukung Grand Launching Universitas Darunnajah dibarengkan dengan penyelenggaraan Konferensi Internasional Pengasuh Pesantren Se-Asia Tenggara.

Hidayat Nur Wahid mengatakan pendirian Universitas Darunnajah oleh Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan, melanjutkan peristiwa sejarah dan semangat para tokoh bangsa dan pimpinan umat untuk menyiapkan satu universitas sebelum Indonesia Merdeka, agar Indonesia sesudah kemerdekaannya diisi dan dikelola oleh sumberdaya manusia Indonesia yang terdidik dan berkeunggulan.

Menurut HNW, pendirian Universitas Darunnajah ini melanjutkan peristiwa sejarah bahwa sebelum Indonesia berdiri, terlebih dahulu dipersiapkan pendidikan tinggi dalam satu universitas. Sehingga pada tanggal 8 Juli 1945, satu bulan sebelum Indonesia merdeka, pimpinan umat dan tokoh bangsa sudah mempersiapkan agar Indonesia merdeka nanti diisi para SDM unggul dan akademisi yang hebat-hebat.

Beberapa tokoh yang medirikan perguruan tinggi Islam itu antara lain Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, Wahid Hasyim dari NU, tokoh PUI Achmad Sanusi yang tahun ini mendapat gelar pahlawan nasional, tokoh dari partai Islam (Masjumi) yaitu Mochammad Roem dan Mochamad Natsir serta tokoh dari nasionalis kebangsaan yaitu Mohammad Hatta, mereka sepakat mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta.

"Para tokoh ini memberi kita keteladanan dan pemaknaan tentang pentingnya universitas Islam untuk mempersiapkan kader bangsa berkeunggulan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, juga sudah sangat sewajarnya bila pendirian dan pengelolaan Universitas Islam menjadi embrio terjalinnya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathoniah dan Basyariya. Maka para tokoh itu para berbeda latarbelakang ormas dan politik, baik Islam dan nasionalis, tapi mereka bisa sepakat dan berkolaborasi, sehingga bisa berkontribusi hadirkan Indonesia Merdeka, sekaligus menyepakati kreasi agar Indonesia merdeka nanti diisi sumber daya manusia yang berkeunggulan, karenanya disiapkanlah Sekolah Tinggi Islam yang kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Kita semua sekarang ini, di kampus Universitas Darunnajah ini, merasakan adanya aura dan spirit kuat, betapa semangat itu akan dilanjutkan dengan berdirinya Universitas Darunnajah," kata HNW dalam Pembukaan Konferensi Internasional Pengasuh Pesantren Se-Asia Tenggara dan Grand Launching Universitas Darunnajah di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, Senin (07/11).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

> "Pendirian Universitas Darunnajah ini melanjutkan peristiwa sejarah bahwa sebelum Indonesia berdiri, terlebih dahulu dipersiapkan pendidikan tinggi dalam satu universitas. Sehingga pada tanggal 8 Juli 1945, satu bulan sebelum Indonesia merdeka, pimpinan umat dan tokoh bangsa sudah mempersiapkan agar Indonesia merdeka nanti diisi para SDM unggul dan akademisi yang hebat-hebat.

Peduli Korban Banjir Labuhan Batu Utara, Iskan Berikan Bantuan Bagi Korban

KUTIPAN

Labuhan Batu Utara (09/11) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis (IQL) mengunjungi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Labuhan Batu Utara.

Kunjungan ini dilakukan secara langsung oleh Iskan untuk memberikan bantuan dari DPR RI dan Kemensos bagi para korban banjir sebagai bentuk keprihatinan terhadap warga yang terdampak bencana banjir.

"Dengar kabar banjir kemarin, saya langsung kordinasi dengan bu mentri dan pejabat dari kemensos untuk turun langsung ke Labuhan Batu Utara dan menyerahkan bantuan kepada para korban. Alhamdulillah, ini semua bentuk empati dari kami. Apalagi disituasi curah hujan tinggi seperti ini. Dalam urusan bencana kita harus cepat tanggap gaboleh anggap enteng," kata Iskan.

Dalam menyerahkan bantuan ini Iskan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Labuhan Batu Utara Samsul Tanjung.

Turut juga hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Utara Jhon Ferry, Wakil Ketua DPP PKS Sumbagut Mustofa Ismail, Direktorat PSKBA Kemensos Fahrudin, Serta Kepala Balai Insyaf Medan Iman Imanuddin.

"Ini semua merupakan bentuk sinergi antar lembaga di daerah kabupaten Labuhan Batu Utara dalam penanganan bencana," kata Iskan.

"Hari ini kami bersama-sama memberikan bantuan berupa perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari senilai 339 jutaan. Yang kami harapkan adalah bantuan ini dapat meringankan beban para korban banjir ini. Dan ini merupakan bentuk mitigasi langsung dari kami. Dan kami berdoa agar para korban diberi kesabaran atas musibah ini dan semoga musibah ini segera berlalu. Aamiin", ucap Iskan setelah memberikan bantuan bencana kepada masyarakat.

Bantuan yang diberikan berupa 1000 paket makanan siap saji, 400 paket makanan anak, 100 paket sandang bayi, 100 paket pembalut wanita, 200 paket kasur, 200 paket selimut, 200 paket family kit,200 paket matras, dan 200 paket sandang dewasa.

Bantuan ini disebarkan dibeberapa lokasi meliputi lingkungan suka rendah, tanah rendah, perumahan flamboyan, dan tanah rendah kuala.

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

"Hari ini kami bersama-sama memberikan bantuan berupa perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari senilai 339 jutaan. Yang kami harapkan adalah bantuan ini dapat meringankan beban para korban banjir ini. Dan ini merupakan bentuk mitigasi langsung dari kami. Dan kami berdoa agar para korban diberi kesabaran atas musibah ini dan semoga musibah ini segera berlalu. Aamiin",

Nevi Zuairina Wujudkan Tambahan Pembangunan Irigasi Tersier Petani di Dapil

KUTIPAN

Kabupaten Agam (09/11) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menerima aspirasi dari sejumlah kelompok tani di Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.

Kabupaten Agam (09/11) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menerima aspirasi dari sejumlah kelompok tani di Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat yakni tambahan irigasi tersier untuk menunjang produksi pertanian di kedua daerah tersebut.

Aspirasi ini telah terealisasi dengan advokasi dari Aleg DPR tersebut dengan jangkauan irigasi mengairi ratusan hektar di daerah Agam dan Padang Pariaman.

Aspirasi yang kemudian di advokasi oleh legislator Sumatera Barat ini, lantas terwujud dengan alokasi anggaran dari pemerintah. Adapun lokasi pembangunan irigasi ini berada di Bdr. Sangkir Garagahan, Nagari Garahan, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dan di Sawah Aru, Nagari Cubadak Mentawai, Kecamatan VII Koto Sei Sariak, Kabupaten Padang Pariaman.

"Saya berharap, irigasi tersier ini dapat bermanfaat di masyarakat sekitar lokasi dengan sebaik-baiknya. Fungsi utama irigasi ini untuk keperluan produksi pertanian, namun tidak menutup kemungkinan, irigasi ini dapat menjadi sumber air untuk keperluan MCK dimana dapat disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar lokasi,", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengungkapkan, bahwa dengan dibangunnya irigasi tersier di sentra-sentra pertanian wilayah Sumatera Barat, dimasa yang akan datang, diharapkan Sumbar dapat menjadi penyumbang terealisasinya ketahanan pangan nasional.

"Memperkuat infrastruktur pertanian hingga nagari yang kemudian merata di berbagai daerah sentra pertanian, bukan tidak mustahil bila kedaulatan pangan bermula dari sini,", tegas Nevi.

Nevi menjelaskan, bahwa Sumatera Barat sangat berpotensi menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Persoalan para petani perlu diakomodir sehingga kedepannya, secara tidak langsung, para petani inilah yang menjadi aktor utama penopang pangan negara.

"Alhamdulillah irigasi sudah berfungsi, semoga nagari-nagari lain yang belum dan memerlukan irigasi tersier ini akan segera di bangun oleh pemerintah sehingga semangat untuk meningkatkan produktivitas pertanian masif di seluruh Sumatera Barat secara merata," tutup Nevi Zuairina.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Saya berharap, irigasi tersier ini dapat bermanfaat di masyarakat sekitar lokasi dengan sebaik-baiknya. Fungsi utama irigasi ini untuk keperluan produksi pertanian, namun tidak menutup kemungkinan, irigasi ini dapat menjadi sumber air untuk keperluan MCK dimana dapat disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar lokasi,",

RESUME ASPIRASI FRAKSI PKS DPR RI

Oktober 2020-Oktober 2022
#PKSMelayaniRakyat

- Fraksi PKS DPR RI **menerima aspirasi** dari seluruh masyarakat di Indonesia pada periode Oktober 2020-Oktober 2022 sebanyak **86 aspirasi.**

- Aspirasi bersifat **virtual** dan **tatap muka.** Adapun aspirasi tatap muka dilaksanakan dengan jumlah terbatas dan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

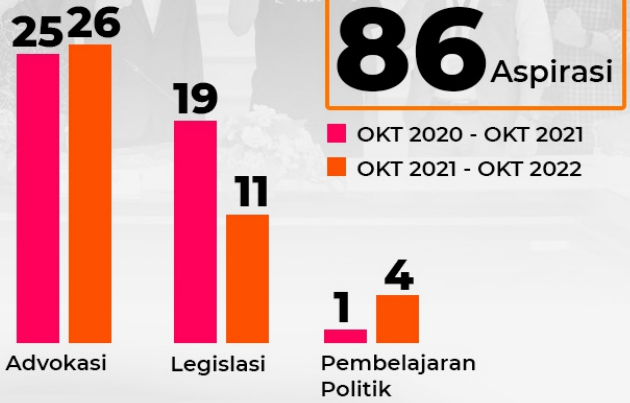

Total OKT 2020 - OKT 2022

86 Aspirasi

OKT 2020 - OKT 2021

OKT 2021 - OKT 2022

Bertemu Konstituen, Amin Ak. Sampaikan Optimalisasi BUMN dalam Percepatan Kebangkitan Ekonomi Nasional

KUTIPAN

Jember (01/10) --- Upaya transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan holding BUMN dapat mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja. Holding BUMN bisa terus berperan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi nasional saat ini dan ke depan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar bertema "Holding BUMN sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan" di Hotel Royal Jember, Senin (31/10/2022).

Seminar tersebut dihadiri oleh 100 pelaku usaha kecil dan menengah se-Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"BUMN bisa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan menjadi _triger_ bagi kebangkitan ekonomi masyarakat," kata Amin.

Lebih lanjut Amin menjelaskan, holding BUMN bisa menghadirkan efisiensi dan peningkatan kinerja BUMN secara signifikan. Peningkatan laba BUMN secara berkelanjutan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pembentukan holding yang dilakukan Kementerian BUMN sudah _on the track_.

Berdasarkan data dari Kementerian BUMN, pada tahun 2020, BUMN menghasilkan laba sebesar Rp13 triliun. Jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi Rp124,5 triliun pada tahun 2021 lalu. Dan ditargetkan tahun 2022 ini meningkat menjadi Rp 144 triliun.

Ditengah lesunya perekonomian nasional, kinerja BUMN dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional berperan penting bagi penciptaan lapangan kerja. Selain itu, upaya BUMN dalam menginisiasi program pembiayaan dan pendampingan untuk pelaku UMKM bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"UMKM itu menampung sekitar 97% tenaga kerja dan juga menyumbang lebih dari 60% bagi _produk domestic bruto_ (PDB) Indonesia. Pendampingan dan pembinaan BUMN terhadap UMKM jelas penting bagi kebangkitan ekonomi nasional," tegas Amin.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id

AMIN AK,M.M.
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Timur IV

"Hal itu bisa menjadikan BUMN Indonesia lebih kompetitif dan berkelas dunia dan siap menghadapi situasi yang berubah dan ketidakpastian. Dari sinilah harapan Holding BUMN dapat menciptakan BUMN yang kuat dan terus menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi nasional",

Secara Simbolis, Dimyati Natakusumah Berikan Tunjangan Kematian kepada Anggota 'Dulur Dimyati'

KUTIPAN

Pandeglang (01/11) –– Seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang telah memiliki kartu keanggotaan secara otomatis menjadi anggota 'Dulur Dimyati' akan mendapatkan tunjangan kematian sebesar Rp 42 juta untuk ahli warisnya.

Hal itu disampaikan Dimyati Natakusumah, selaku Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 1 yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang saat menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis pada ahli waris anggota DPD PKS Kabupaten Lebak yang meninggal dunia di acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan DPD PKS Kabupaten Pandeglang, Minggu (30/10/2022) di Hotel S' Rizki Pandeglang.

Menurut Dimyati yang juga pimpinan BURT DPR RI ini, seluruh kader PKS tetap solid dan bisa mensukseskan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

"Saya berharap kader-kader PKS ada di majlis-majlis taklim dan masjid-masjid untuk lebih dekat dengan umat. Kita harus banyak berbuat demi kepentingan umat dan memperjuangkannya," ucap Dimyati.

Dimyati juga berharap seluruh kader bantu mensukseskan PKS bersama Dulur Dimyati, dimana akan diberikan tunjangan kematian senilai Rp 42 juta untuk ahli warisnya.

"Dimana kalau Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS itu berguna dan bermanfaat karena menjadi 'Dulur Dimyati' yang akan mendapat tunjangan kematian," tandas Dimyati.

"Dan tahun 2023 nanti seluruh pemegang KTA PKS itu harus menjadi Dulur Dimyati, semoga ada manfaatnya untuk ahli waris," sambungnya.

Ditambahkannya, semua kader PKS harus cepat aktif menjaring mendekati rakyat dengan banyak berbuat kebaikan.

"Saya yakin, 2024 PKS akan menjadi menang dihati rakyat, karena PKS memiliki warna orange yang mempunyai daya tarik tersendiri," pungkasnya.

Hadir pada acara itu, Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Gembong, Ketua MPD PKS, Nurul Wasyiah yang juga anggota DPRD Banten, dan seluruh anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS, Ketua MUI Pandeglang, KH. Jamzami.

Sementara Ketua DPD PKS Kabupaten Pandeglang, Tb. Asep Rafiudin Arief mengatakan peringatan Maulid Nabi baru dapat dilaksanakan karena setelah seluruh kader dan fraksi PKS mengikuti acara maulid nabi di masing-masing wilayahnya.

"Acara Maulid Nabi kali ini mengambil tema Teladani Nabi Muhammad SAW Dalam Melayani dan Membela Umat. Maka seluruh kader PKS harus bisa melayani umat tanpa membeda-bedakan seperti yang diteladani oleh Rasulullah," harapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten I

"Saya berharap kader-kader PKS ada di majlis-majlis taklim dan masjid-masjid untuk lebih dekat dengan umat. Kita harus banyak berbuat demi kepentingan umat dan memperjuangkannya,"

Akhir Masa Reses, Diah Nurwitasari Gelar Pelatihan Cetak Kreator Konten Kebaikan

KUTIPAN

Kabupaten Bandung (01/11) --- Anggota Komisi VII DPR-RI Diah Nurwitasari bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN) mengadakan Pelatihan dan Edukasi Literasi Informasi di Era Digital bagi Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda. Pelatihan ini digelar di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini digelar dalam rangka mencetak generasi muda yang cerdas beraktifitas di dunia maya agar mereka produktif tanpa harus terjebak dalam pengaruh negatif dari internet.

"Zaman sekarang ini internet telah menjadi kebutuhan umum, dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan internet untuk berbagai kebutuhan. Banyak yang menggunakannya untuk kebaikan, tapi tak sedikit juga yang menyalahgunakannya." Tutur perempuan Anggota Komisi VII DPR-RI ini.

Tsunami informasi yang terjadi di era digital ini, imbuh Diah, perlu disikapi dengan bijak agar faktor keamanan, skill, budaya dan etika dalam bersosmed bisa dikuasai. Oleh karena itu dalam pelatihan kali ini kami mengundang para pegiat humas dari kalangan mahasiswa, pelajar dan pemuda dari Kabupaten Bandung dan KBB." Diah Nurwitasari menambahkan.

Diah berharap para peserta yang hadir bisa menularkan hasil pelatihan ini ke masyarakat umum, "Idealnya setelah lulus dari pelatihan ini, para peserta yang nanti diberikan sertifikat resmi dari BRIN mampu menyebarkan pemahaman tentang literasi informasi ini kepada keluarganya, teman-temannya dan masyarakat luas pada umumnya." Ucap Diah menutup sambutannya.

Adapun pejabat BRIN yang turut hadir dalam sesi sambutan acara ini Dr. Emmanuel Sungging Mumpuni menghaturkan apresiasi kepada anggota DPR-RI yang turut berkolaborasi mencerdaskan masyarakat. "BRIN sebagai lembaga baru di negara ini memiliki 12 Organisasi riset dan 85 pusat riset mengucapkan terimakasih kepada Ibu Diah Nurwitasari yang selalu bekerjasama dan mendukung BRIN untuk menghadirkan produk inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat."

Setelah di Soreang ini kegiatan serupa yang bertema Berbakti Untuk Negeri ini akan digelar di beberapa tempat lain dengan segmen peserta yang berbeda dari unsur masyarakat Kabupaten Bandung dan KBB.

Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Zaman sekarang ini internet telah menjadi kebutuhan umum, dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan internet untuk berbagai kebutuhan. Banyak yang menggunakannya untuk kebaikan, tapi tak sedikit juga yang menyalahgunakannya."

PKS LEGISLATIVE CORNER

MEMBAHAS ISU DARI SUDUT YANG PAS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PKS

Live Interactive

Bersama Anggota Legislatif PKS

BERSAMA **ARI PUTRA UTAMA**

Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB

fraksi.pks.id | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @FPKSDPRRI | PKS TV DPR RI

Wisuda Mahasiswa Politeknik Purbaya, Fikri Orasi Ilmiah Gunakan Bahasa Tegalan

KUTIPAN

Tegal (31/10) –- Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyampaikan orasi ilmiah dengan bahasa Tegalan dihadapan Wisudawan Politeknik Purbaya yang digelar di Syailendra Convention Hall, Hotel Grand Dian Hotel Slawi, Kamis, (27/10/2022).

"Dengan rasa syukur Politeknik Purbaya yang lahir dari masyarakat dan dunia industry Tegal mengadakan Wisuda yang kedua," ungkapnya.

Saat ini adalah untuk mengokohkan keberadaan Perguran Tinggi Vokasi pertama yang berdiri di Kabupaten Tegal dengan tema 'Bersatu, Bangkit dan Tumbuh Melalui Pendidikan Vokasi, Mencetak Pemuda yang Siap Kerja, Siap Wirausaha Berbasis Kearifan Lokal'.

"Lembaga pendidikan yang dibangun dengan cita-cita menjadikan Tegal sebagai leading sektor di Industri Logam utamanya di Indonesia dan bisa berkiprah dalam memajukan program-program pemerintah daerah," jelas Fikri.

Sejarahnya Tegal, imbuhnya, berbagai produknya terutama logam sudah mengisi kebutuhan komponen secara nasional dan itu dibuat di industry – industry rumahan.

"Alamnya sudah dikaruniai oleh Tuhan demikian potensi yang berkelas dunia, karenanya saatnya menerapkan prinsip Pentahelix kolaborasi Akademisi, Pebisnis, Pemerintah, Komunitas dan Media untuk bisa bersama memajukan daerah Tegal untuk kembali meraih kejayaannya bahkan mungkin bisa lebih baik," ungkap Fikri.

Kearifan lokal, katanya, bisa menjadi bahan optimistis lulusan tidak tergantung dengan dunia luar yang masih era disrupsi, kearifan lokal juga bisa menjadi modal untuk bersatu mengangkat potensi –potensi lokal melupakan perbedaan parsial partai dan kepentingan lainya.

Perlu diketahui bahwa wisuda kali ini Politeknik Purbaya bisa meluluskan dari Prodi Teknik Informatika (TI) 107 wisudawan, dan dari Prodi Teknik Mesin 16 wisudawan, total 123 wisudawan, dengan Peraih IPK Terbaik 3,82. Diwiuda langsung oleh Direktur Titiek Deasy Saptaryani, ST, MT.

Wujud dukungan pendidikan yang berkelanjutan dari semua pihak, melanjutkan kerjasama dengan OPTD Pemerintah Kabupaten Tegal di Wisuda setahun yang lalu ada Penanda tangan dengan Pemda Kabupaten Tegal, maka pada acara ini dilakukan acara penandatangan kerjasama Kampus Bersinar dengan BNN, MoU dengan KADIN kabupaten Tegal, MoU dengan dunia industry 8 (delapan) PT & CV dan gelar budaya khas Tegal.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

"Saat ini adalah untuk mengokohkan keberadaan Perguran Tinggi Vokasi pertama yang berdiri di Kabupaten Tegal dengan tema 'Bersatu, Bangkit dan Tumbuh Melalui Pendidikan Vokasi, Mencetak Pemuda yang Siap Kerja, Siap Wirausaha Berbasis Kearifan Lokal'.

Kunjungi Sijunjung, Hermanto Serahkan Bibit Buah-Buahan

KUTIPAN

Kabupaten Sijunjung (27/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan singgah di Kabupaten Sijunjung.

Di kabupaten yang berjuluk Ranah Lansek Manih ini Hermanto menyerahkan bibit buah-buahan produktif bantuan pemerintah.

"Bibit-bibit ini bersertifikat. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama berbuah," ujar Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan penyerahan bibit secara simbolis di Jorong Koto Pulasan, Nagari Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung belum lama ini.

Kalau sudah berbuah, lanjutnya, bisa dijual sebagai salahsatu penghasilan keluarga. "Bisa juga dikonsumsi sendiri dan dibagi ke tetangga agar kondisi masyarakat sehat dengan banyak mengkonsumsi buah-buahan," tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.

Selain untuk penghasilan keluarga dan kesehatan masyarakat, kata Hermanto, bantuan bibit ini dalam jangka panjang dimaksudkan untuk rehabilitasi lahan.

"Bibit-bibit tersebut kalau ditanam dan dirawat dengan baik akan tumbuh menjadi pohon-pohon dengan cabang dan ranting yang banyak. Dengan demikian tentu akarnya dalam dan daunnya juga lebat," paparnya.

Daun yang lebat itu, jelasnya, bisa menahan air hujan sehingga tidak langsung menerpa tanah.

"Hal ini bisa mencegah pengikisan dan pergerakan tanah juga longsor," ucap Hermanto.

"Jadi bermula dari bibit produktif buah-buahan selanjutnya bisa berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan," pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Jenis bibit buah-buahan yang diserahkan untuk masyarakat Sijunjung adalah alpukat, durian, lengkeng, mangga, manggis, jambu, jeruk, pinang, rambutan dan sirsak. Dalam penyerahan bibit tersebut Hermanto didampingi oleh tokoh setempat Hendri Susanto dan Kepridaus.

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Bibit-bibit ini bersertifikat. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama berbuah," Kalau sudah berbuah, bisa dijual sebagai salahsatu penghasilan keluarga. "Bisa juga dikonsumsi sendiri dan dibagi ke tetangga agar kondisi masyarakat sehat dengan banyak mengkonsumsi buah-buahan,"

Hadiri Festival Pulau Teluk Valentine, Saadiah Dorong Pengembangan Perikanan Terintegrasi

KUTIPAN

Buano Utara (30/10) --- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Festival Pulau Selat Valentine. Festival dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten SBB Jan Soukotta mewakili Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As'aduddin, di Dusun Kelapa, Pulau Kasuari, Buano Utara, Kamis (27/10)

Kemeriahan Festival Selat Valentine dengan digelarnya berbagai atraksi seni budaya serta berbagai produk lokal produksi warga setempat.

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty ST yang turut hadir menyebut, Festival Valentine menjadi momentum untuk memperkenal pesona dan potensi wisata di kawasan tersebut.

"Potensi kawasan selat Valentine luar biasa, keindahan alamnya mempesona. Waktunya untuk diperkenalkan sebagai destinasi wisata di Kabupaten Seram Bagian Barat", tandas Saadiah Uluputty.

Selain keindahan Kawasan valentine, Saadiah terkesan dengan keramahan masyarakat di sekitarnya.

"Kesantunan dan keramahan masyarakat menjadi modal bagi pembangunan kawasan pariwisata seperti di Selat Valentin", sebut Anggota Fraksi PKS ini.

Potensi Selat Valentine tidak hanya Kawasan wisatanya, namun dapat dikembangkan konsep pengembangan perikanan budidaya.

Pihaknya, mendorong mendorong agar pemerintah serius dan sungguh sungguh menyusun konsep pengembangan perikanan budidaya bagi Kawasan Selat Valentine.

"Pengembangan perikanan terintegrasi menjadi potensi lain yang mesti diberi perhatian oleh pemerintah. Karena berdampak positif, bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat", lanjutnya.

Potensi kawasan berciri budidaya di selat ini tegas Saadiah, belum ditata dan dikembangkan dalam konsep budidaya. Baik pengembangan ikan dasar maupun rumput laut yang menjadi komoditi sektor kelautan dan perikanan.

"Maka harus ada konsep pengembangan ekonomi biru berbasis komoditi berkelanjutan yang disampaikan oleh menteri KKP. Saya yakin dapat diwujudkan disini", kata Saadiah.

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Pengembangan perikanan terintegrasi menjadi potensi lain yang mesti diberi perhatian oleh pemerintah. Karena berdampak positif, bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat".

Bencana Longsor di Kecamatan Karangreja Purbalingga, Rofik Respon Cepat Kirim Bantuan Sosial

KUTIPAN

Purbalingga (29/10) — Hujan deras yang seharian mengguyur wilayah Kabupaten Purbalingga pada Selasa (25/10) menyebabkan sejumlah wilayah terkena bencana alam. Mulai dari tanah longsor, banjir hingga tanah bergerak.

Akibat bencana alam ini, ratusan warga di Desa Tlahab Lor dan Siwarah Kecamatan Karangreja harus mengungsi di tempat yang lebih aman.

Para pengungsi di Desa Siwarak dipusatkan di tiga titik yakni gedung TPQ Miftahul Ulum, TPQ Sidadadi, dan TPQ Nurul Hikmah, dan di Desa Tlahab Lor dipusatkan di Gedung TPQ dan Gedung Taman Kanak-Kanak.

Setelah menerima laporan atas adanya musibah bencana alam ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto langsung menerjunkan tim untuk mengirimkan bantuan kepada korban bencana longsor di Desa Tlahab Lor dan Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Purbalingga.

Adapun sembako yang diberikan berupa Sembako, Mie Instant, pampers bayi, air mineral gallon, selimut dan pakaian layak pakai.

Rofik menyampaikan belasungkawa terhadap korban bencana

"Kami atas nama teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan belasungkawa terhadap musibah bencana alam yang terjadi di Desa Siwarah dan Desa Tlahab Lor." Kata Pria yang akrab dipanggil Mas Rofik

Melalui bantuan yang dikumpulkan bersama dengan Relawan PKS dan Tim SEMAR (Sedulur Mas Rofik) Rofik berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban bencana.

"Kami berharap, bantuan yang hari ini didistribusikan dapat membantu meringankan para korban" Tegasnya

Bantuan didistribusikan oleh Relawan PKS dan Tim SEMAR, didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Sumarsih, dan diterima langsung oleh Kepala Desa Tlahab Lor Dirmanto dan Perangkat Desa Siwarah di Posko Logistik.

Korban yang terdampak bencana longsor mencapai 200 jiwa di Desa Tlahab Lor, dan 209 jiwa di Desa Siwarak.

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Kami atas nama teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan belasungkawa terhadap musibah bencana alam yang terjadi di Desa Siwarah dan Desa Tlahab Lor."

Kunjungi Komunitas Pertanian di Dapil, Junaidi Sampaikan Kebanggaan karena Bisa Produksi Pupuk Sendiri

KUTIPAN

Lampung (30/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly dalam kesempatan kunjungan reses di daerah pemilihan berjumpa dengan komunitas pertanian yang menggunakan pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk yang mahal, Ahad (30/10).

Anggota komisi XI ini melihat potensi yang bagus dari pupuk organik ini, serta jalan keluar bagi para petani khususnya di Provinsi Lampung yang kesulitan dalam mendapatkan pupuk murah dan ramah lingkungan untuk tanaman yang mereka tanam.

"Ini merupakan titik terang bagi petani untuk bisa terus bercocok tanam ditengah mahalnya harga pupuk yang biasa mereka pakai. Potensi pupuk organik ini tak malah baik dengan pupuk yang biasa dipakai petani pada umumnya", ujar Junaidi.

Junaidi menambahkan bahwa komunitas petani menggunakan potensi sumber daya alam lokal seperti sampah pasar, kotoran hewan, sampah daun dan komponen yang sifatnya organik lainnya.

"Sebuah terobosan yang baik dengan melihat potensi sumberdaya alam lokal yang biasanya kita abaikan, di dalam komunitas ini diolah menjadi pupuk yang sangat bermanfaat", kata Junaidi.

Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyampaikan rasa bangganya melihat kreatifitas petani dalam mencari alternatif pupuk untuk tanaman mereka, dimana pupuk ini mereka buat sendiri. Ditengah kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk yang dicabut subsidi nya oleh pemerintah, terutama untuk petani singkong yang sangat banyak di Lampung, mereka mampu mencari solusi yang baik.

"Saya bangga dan senang bahwa para petani kita mampu berinovasi dengan mencari solusi ditengah mahalnya harga pupuk untuk mereka pakai. Apalagi dengan jumlah petani yang mayoritas menanam singkong, merupakan ide cemerlang dengan mampu membuat pupuk organik sendiri", tutup Junaidi.

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

"Sebuah terobosan yang baik dengan melihat potensi sumberdaya alam lokal yang biasanya kita abaikan, di dalam komunitas ini diolah menjadi pupuk yang sangat bermanfaat",

Hadiri Peringatan Maulid, Mahfudz: Bangsa Indonesia Rindu Lahirnya Pemimpin seperti Nabi SAW

KUTIPAN

Bekasi (31/10) --- Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI yang juga Dewan Penasehat Majelis Mudzakaroh Ulama (Majmu) Bekasi Raya, Mahfudz Abdurrahman, menghadiri dan memberikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, yang dilaksanakan oleh Majmu Bekasi Raya pimpinan DR. KH. Zamaksyari Abdul Majid, MA di Gedung Asrama Haji Kota Bekasi, Sabtu (29/10/2022).

Pada sambutannya Mahfudz Abdurrahman berpesan kepada jamaah dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir untuk senantiasa mengingat dan meneladani jejak jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW, khususnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan bangsa. Karena Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan.

"Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW esensinya adalah mengulang kembali ingatan kita akan jejak perjalan Nabi, dan tentu kita wajib meneladaninya, khususnya pada aspek sebagai seorang pemimpin bagi keluarga dan bangsa. Karena kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan" kata Mahfudz Abdurrahman.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Mahfudz Abdurrahman menyampaikan harapannya nanti di 2024 yang menjadi momentum pemilihan pemimpin bangsa dapat hadir seorang pemimpin yang mampu menterjemahkan dan menjalankan nilai nilai kepemimpinan Nabi.

"Di tahun 2024 akan dilaksanakan kembali proses pemilihan kepemimpinan bangsa. Saya berharap peran ulama agar terus mengingatkan umat sehingga muncul pemimpin bangsa yang mampu menterjemahkan dan menjalankan jejak jejak perjalanan Nabi dalam konteks kepemimpinannya". Tegas Mahfudz Abdurrahman.

Kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW juga dihadiri perwakilan ormas Islam, para pimpinan DKM se Bekasi, serta Da'i kondang nasional Prof. DR. KH. Manarul Hidayat pimpinan Pondok Pesantren Al Manar.

Kegiatan Maulid Nabi juga dirangkai dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada anak yatim.

H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW esensinya adalah mengulang kembali ingatan kita akan jejak perjalan Nabi, dan tentu kita wajib meneladaninya, khususnya pada aspek sebagai seorang pemimpin bagi keluarga dan bangsa. Karena kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan"

PROGRAM UNGGULAN
FRAKSI PKS DPR RI

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipks)

Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

Hadiri Konsolidasi DPD PKS Kabupaten Bekasi, Syaikhu: Ini harus Jadi Tonggak Kemenangan

KUTIPAN

Kabupaten Bekasi (31/10) --- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menghadiri konsolidasi akbar struktur dan anggota DPD PKS se Kabupaten Bekasi, pada Ahad (30/10/2022).

Syaikhu hadir dalam kesempatan tersebut untuk berdiskusi dengan struktur pengurus dan anggota terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.

"Ini bagian dari bersamai struktur dan anggota dalam upaya memenangkan PKS di Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan itu, saya lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi rekan-rekan struktur DPC dan DPRa," kata Syaikhu.

"Berbagai pertanyaan dan aspirasi mereka sampaikan Dari soal isu koalisi hingga bagaimana caranya agar dapat terus membersamai masyarakat dan memenuhi harapan mereka. Saya catat dan dengarkan itu semua," sambungnya.

Syaikhu menegaskan dalam meraih kemenangan di Pemilu 2024 perlu berkolaborasi secara aktif, ia juga meminta agar seluruh struktur saling berkomunikasi untuk memberikan perkembangan di Kabupaten Bekasi.

"Untuk menuju kemenangan 2024, saya meminta seluruh potensi di Kabupaten Bekasi ini harus dikerahkan. Aleg dan struktur wajib berkolaborasi aktif. Saya akan bantu monitor dan evaluasi. Karena itu, saya harus tahu kondisi Kabupaten Bekasi seakurat mungkin. Saya minta kepada pengurus DPRa jangan sungkan memberi informasi objektif, bisa melalui Ketua DPD Kang Budi MM atau Tenaga Ahli saya di DPR Kang Erwyn," tutur Syaikhu.

Ia juga memberi apresiasi kesungguhan para anggota atas terselenggaranya konsolidasi akbar PKS se Kabupaten Bekasi demi meraih kemenangan di Pemilu nanti.

"Saya berbahagia sekali melihat semangat struktur dan anggota yang hadir. Dua hari lamanya mereka meninggalkan anak istri untuk melakukan kegiatan ini. Tujuannya agar PKS menang pada Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Bekasi," ucap Syaikhu.

"Kegiatan ini harus menjadi tonggak kemenangan. Sepulang dari sini, kita tak boleh berdiam diri. Teruslah bergerak secara sungguh-sungguh. Insya Allah akan ada jalan yang diberikan Allah SWT kepada kita dalam meraih kemenangan," tandas Syaikhu.

Konsolidasi Akbar Struktur dan Anggota PKS sekabupaten Bekasi berlangsung 29-30 Oktober 2022 di Puncak, Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan 23 DPC dan 187 DPRa.

H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Saya berbahagia sekali melihat semangat struktur dan anggota yang hadir. Dua hari lamanya mereka meninggalkan anak istri untuk melakukan kegiatan ini. Tujuannya agar PKS menang pada Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Bekasi,"

Bukhori Serahkan Bantuan Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten Semarang

KUTIPAN

Semarang (26/10) –– Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan senilai Rp160 juta kepada masyarakat Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang di sela acara pengukuhan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Semarang.

Penyerahan bantuan tersebut berhasil terselenggara berkat kerja sama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Basari, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bukhori selaku Wakil Rakyat dari Kabupaten Semarang atas kepeduliannya terhadap konstituennya.

Bukhori berharap kolaborasi antara penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah dalam melayani masyarakat dapat dilakukan secara konsisten.

Bukhori mengatakan, komunikasi antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial selama ini berjalan dengan positif. Hal itu yang membuat DPR dan Kementerian Sosial banyak merealisasikan program-program yang produktif dan berdampak untuk masyarakat.

"Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi masyarakat kita dari berbagai risiko bencana yang marak terjadi belakangan ini. Selain memberikan dukungan anggaran, DPR juga mendukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia memitigasi risiko bencana di desa-desa yang rawan bencana melalui program Kampung Siaga Bencana," kata Anggota DPR dari Fraksi PKS ini seusai acara pengukuhan Kampung Siaga Bencana di Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Rabu (26/10/2022).

Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 1 ini menjelaskan, output yang diharapkan dari program Kampung Siaga Bencana adalah terwujudnya sumberdaya manusia desa yang terlatih dan memiliki keterampilan khusus dalam merespons bencana di desa mereka.

"Program KSB membentuk mereka agar lebih cakap dalam mengantisipasi, menanggulangi, dan memitigasi risiko bencana di desa mereka. Terlebih, Desa Keseneng memiliki riwayat bencana longsor yang pernah terjadi pada tahun 2018 dan 2021 yang berakibat pada kerugian dari aspek ekonomi, psikis, maupun nyawa penduduk," ungkapnya.

Anggota Badan Legislasi DPR ini menambahkan, sumberdaya manusia di Desa Keseneng telah dilatih oleh para praktisi kebencanaan, khususnya terkait dengan spesifikasi bencana tanah longsor. Selain memperkuat keterampilan teknis, pelatihan itu juga diharapkan dapat memelihara modal sosial warga Desa Keseneng yang sudah ada, yakni sikap gotong royong.

"Selama ini warga Desa Keseneng telah memiliki social capital yang cukup baik, yakni budaya gotong royong, yang diharapkan dapat terpelihara secara berkelanjutan melalui program Kampung Siaga Bencana ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Program KSB membentuk mereka agar lebih cakap dalam mengantisipasi, menanggulangi, dan memitigasi risiko bencana di desa mereka. Terlebih, Desa Keseneng memiliki riwayat bencana longsor yang pernah terjadi pada tahun 2018 dan 2021 yang berakibat pada kerugian dari aspek ekonomi, psikis, maupun nyawa penduduk,"

Masa Reses di Kab. Mempawah

Alifudin Ajak Masyarakat Hidup Seimbang Jaga Kesehatan Jasmani dan Ruhani

KUTIPAN

Kabupaten Mempawah (27/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin mengisi masa reses dengan menghadiri kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat (Germas) dalam Penurunan Stunting dan Covid-19 di Aula Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis, (27/10).

Dalam sambutannya, Alifudin mengatakan, Germas merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI Joko Widodo dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif, serta melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Lintas sektor diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat mendukung pengimplementasian Germas.

"Gerakan masyarakat hidup sehat sangat relevan untuk menjawab permasalahan stunting, dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti selalu membawa anak ke posyandu setiap bulan untuk di pantau tumbuh kembangnya supaya terdeteksi secara dini apabila terjadi kelainan, menggalakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan menanam sayur untuk konsumsi sendiri, stop BAB sembarang tempat, akan sangat berdampak terhadap penurunan stunting," terang Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Barat 1 ini.

Stunting, imbuh Alifudin, merupakan gambaran terjadinya gangguan pertumbuhan fisik, otak, kecerdasan, dan metabolisme tubuh. Sedangkan anak yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap, berisiko menderita kecacatan hingga kematian. Oleh karenanya membutuhkan penanganan serius dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor.

"Kami H. Alifudin, SE., MM Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalimantan Barat Fraksi PKS selalu mendukung program-program Pemerintah di Kemenkes RI baik dari segi pembentuk Undang-Undang, Fungsi Anggaran dan Pelaksana Pengawasan terhadap pemerintah sosialisasi turun lapangan langsung ke masyarakat khususnya wilayah Mempawah Kalimantan Barat," tutup Alifudin

Acara sosialisasi dihadiri Bupati Kabupaten Mempawah Erlina, Anggota DPR RI Fraksi PKS Alifudin, Kementerian Kesehatan Savaart Hutagalung, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Yulsius Jualang, Dinas Kesehatan Mempawah Utin Erni, Camat Segedong Arifin dan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat.

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

“Gerakan masyarakat hidup sehat sangat relevan untuk menjawab permasalahan stunting, dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti selalu membawa anak ke posyandu setiap bulan untuk di pantau tumbuh kembangnya supaya terdeteksi secara dini apabila terjadi kelainan, menggalakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan menanam sayur untuk konsumsi sendiri, stop BAB sembarang tempat, akan sangat berdampak terhadap penurunan stunting”

Aleg PKS Minta Peserta Sertifikasi Bidang Konstruksi Disalurkan Ke Proyek PUPR

KUTIPAN

Semakin banyak tenaga terampil bersertifikat di daerah, khusus di dapil Jabar IX, menurut Toriq akan meningkatkan kemampuan bersaing. Selain itu ada harapan mereka akan membuka lapangan kerja baru di kota Tasikmalaya yang memiliki angka pengangguran tinggi.

Tasikmalaya (27/10) --- Dalam kegiatan Pembekalan Dan Uji Kompetensi/Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Terampil Bidang Konstruksi Angkatan XIII-XIV 14 di Jawa Barat Tahun 2022, Toriq Hidayat Minta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) prioritaskan peserta.

"Implementasikan kegiatan ini tidak cukup dengan pelatihan.Butuh tindak lanjut berupa informasi serta akses penyaluran keterampilan peserta. Sederhananya, peserta pelatihan idealnya menjadi prioritas utama bekerja pada proyek-proyek PUPR," ujar Politisi PKS ini.

Selaku Anggota Komisi V DPR RI, Toriq mengapresiasi upaya Dirjen Bina Konstruksi PUPR meningkatkan kompetensi dan legalisasi para tenaga terampil di daerah khusus di bidangnya. Ia berharap jumlah volume kegiatan dan peserta ditambah.

"Terimakasih kepada penyelenggara. saya optimis jika volume sertifikasi ini ditambah jumlahnya maka dapat menghilangkan permasalahan sulitnya tenaga terampil daerah mendapatkan sertifikasi. Karena sebagian besar lembaga kompetensi berada di Ibukota," jelasnya.

Semakin banyak tenaga terampil bersertifikat di daerah, khusus di dapil Jabar IX, menurut Toriq akan meningkatkan kemampuan bersaing. Selain itu ada harapan mereka akan membuka lapangan kerja baru di kota Tasikmalaya yang memiliki angka pengangguran tinggi.

Kegiatan Pembekalan Dan Uji Kompetensi/Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Terampil Bidang Konstruksi Angkatan XIII – XIV Jawa Barat Tahun 2022 yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya ini berlangsung selama 4 hari (25/10 sd 28/10) yang diikuti 50 orang peserta.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

"Implementasikan kegiatan ini tidak cukup dengan pelatihan.Butuh tindak lanjut berupa informasi serta akses penyaluran keterampilan peserta. Sederhananya, peserta pelatihan idealnya menjadi prioritas utama bekerja pada proyek-proyek PUPR,"

PKS
Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI
@fraksipksdprri
fraksi.pks.id
FPKS DPR RI
fraksipksdprri
@FPKSDPRRI
PKS TV DPR RI

Kehumasan Jadi Isu Utama Dalam Kunjungan Aspirasi FPKS DPRD Kota Depok

KUTIPAN

Jakarta (03/11) — Sekitar 10 orang Perwakilan DPRD Depok mengunjungi kantor FPKS DPR RI membahas mengenai kehumasan di ruang rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, pada Rabu (02/11/2022).

Kunjungan aspirasi ini dipimpin oleh Ketua FPKS DPRD Kota Depok Hafid Nasir dan diterima oleh Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama.

Dalam sambutannya Hafid Nasir mengatakan kunjungan diharapkan bisa memaksimal-kan kualitas kehumasan FPKS DPRD Depok sekaligus juga menyerap aspirasi.

"Melalui kunjungan ini kami berharap strategi politik DPRD Kota Depok dalam media bisa dioptimalkan dengan baik," kata Hafid.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama saat menyambut rombongan mengatakan bahwa strategi politik dalam media sangat penting dilakukan.

Suryadi menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap program yang dilakukan yang penting adalah bagaimana realisasinya, namun pemberitaan juga dinilai tidak kalah penting agar masyarakat tau program-program PKS, sebagai bentuk laporan tanggung jawab aspirasi mereka.

"Media saya pikir sangat penting bagi kita, karena itu merupakan aksi kita dan sebagai bentuk laporan tanggung jawab kita, maka masyarakat harus tau kegiatan-kegiatan ini, bagaimana sikap kita dan lain-lain itu harus diketahui" ujarnya.

Suryadi juga menambahkan bahwa tidak optimalnya media pemberitaan kegiatan kita akan berdampak pada pengetahuan masyarakat secara umum pada kita.

"Terkadang banyak kegiatan-kegiatan kita yang telah dilaksanakan namun masyarakat belum tau karena kita belum mampu mencapai atau menjangkau mereka. Ada berita segmen yang sering kita sebarkan namun masyarakat tetap tidak tahu, jangan-jangan mereka memang tidak dijangkau. Makanya para kader juga harus memprioritaskan hal tersebut," tutup Suryadi.

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T
Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Pada dasarnya setiap program yang dilakukan yang penting adalah bagaimana realisasinya, namun pemberitaan juga dinilai tidak kalah penting agar masyarakat tau program-program PKS, sebagai bentuk laporan tanggung jawab aspirasi mereka.

Jadi Narasumber Webinar Kesbangpol, Anis Tekankan Perempuan Politik Fokus Peningkatan Kualitas Diri

KUTIPAN

Jakarta (31/10) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, menjadi narasumber pada acara Webinar Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Rangka Kesetaraan Gender di Jakarta Timur yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Jakarta Timur pada Kamis (27/10/2022).

Narasumber lain yang hadir pada acara ini adalah Achmad Yani Rivai Yusuf, Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Dermawan, Asisten Deputi Politik dan Hukum Kementerian PPAP RI.

Dalam paparannya, Anis menjelaskan bahwa selama ini politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dunia kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh perempuan. Politik bagi perempuan identik dengan sesuatu yang aneh karena politik dikaitkan dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni.

Namun sesungguhnya menurut Anis, kekuasaan pada dasarnya netral. Ia bisa digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya.

"Di dunia politik, kekuasaan yang digunakan dengan baik diwujudkan melalui kepatuhan, perubahan dan pembaharuan. Kenyataan membuktikan, dimana pun seorang warga negara baik laki-laki dan perempuan tidak mau berpolitik, secara sadar atau tidak sadar ia menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Karena mereka yang aktif dalam politiklah yang nantinya akan membuat keputusan dan mengatur kehidupan warga negara yang tidak mau berpolitik itu," papar Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menguraikan mengenai pentingnya perempuan terlibat dalam politik. Beberapa poin yang disampaikan oleh Anis diantaranya karena setengah jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Kaum perempuan ini memiliki potensi yang besar dan kontribusi perempuan sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Partisipasi perempuan merupakan salah satu prasyarat dan pemenuhan prinsip dasar demokrasi.

"Kehadiran perempuan di dunia politik juga untuk memenuhi prinsip keterwakilan substantif, yaitu sejauh mana kebijakan yang dihasilkan oleh wakil rakyat sungguh-sungguh memenuhi kepentingan konstituennya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Di dunia politik, kekuasaan yang digunakan dengan baik diwujudkan melalui kepatuhan, perubahan dan pembaharuan. Kenyataan membuktikan, dimana pun seorang warga negara baik laki-laki dan perempuan tidak mau berpolitik, secara sadar atau tidak sadar ia menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Karena mereka yang aktif dalam politiklah yang nantinya akan membuat keputusan dan mengatur kehidupan warga negara yang tidak mau berpolitik itu

Habib Aboe Ajak Pemuda Semangat Jaga Persatuan dan Kesatuan di Hari Sumpah Pemuda

KUTIPAN

Jakarta (28/10) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy menanggapi momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Jum'at, (28/10).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, menjelang kontestasi politik 2024 kita perlu membawa semangat sumpah pemuda dalam suasana politik nasional.

"Sumpah pemuda memberikan inspirasi semangat menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya, hal itu perlu menjiwai suasana politik nasional," ungkap Sekjen DPP PKS ini.

Dengan memaknai semangat sumpah pemuda, imbuhnya, langkah-langkah politik yg dilakukan akan selalu berorientasi pada kesatuan bangsa.

"Sehingga, dinamika politik nasional akan selalu berkembang, namun tetap dalam kerangka persatuan," ujarnya.

Setiap politisi, kata Habib Aboe, perlu mengingat bagaimana dahulu para pemuda menyatukan visi kebangsaan, dimana persatuan menjadi tujuan utama di atas kepentingan kelompok dan golongan.

"Spirit tersebut harus kita teladani bersama, sehingga meskipun kita berkontestasi secara politik, semangat persatuan dan kepentingan nasional harus diutamakan," pungkasnya.

"Mari bersama meneladani semangat pemuda, agar bangsa ini semakin kokoh, berdaya saing dan mampu bertahan dalam percaturan internasional. Sehingga, cita cita nasional akan bisa terwujud dengan baik," tutup Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Sekjen DPP PKS

“Selain itu dari sisi fiskal pemerintah perlu menjaga efektifitas dan efisiensi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya dengan prioritas belanja yang berkualitas dan menunda proyek ambisius seperti pembangunan Ibukota baru disaat resesi ekonomi global,”

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Salurkan

ASPIRASI ANDA

DI HARI ASPIRASI FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/

HNW: Torehkan Sejarah, Delegasi Sepakati Pembentukan Forum MPR dan Penguatan Peran Majelis

KUTIPAN

Jakarta (27/10) --- Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid bersyukur, bahwa semua delegasi yang mengikuti Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, dan Nama Lain yang sejenis dari Negara-Negara Organisasi Kerjasama Islam

sangat antusias mendukung usulan MPR RI untuk pembentukan Forum MPR, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, atau nama Lainnya yang sejenis dalam satu forum yang menjadi bagian dari Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC adalah Perhimpunan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI).

Mereka juga, kata Hidayat, mengapresiasi inisiasi yang diusulkan oleh MPR RI ini, karena bisa menjadi sarana untuk memperkuat peran bagi Majelis, memperbanyak mitra untuk berkontribusi menguatkan praktek demokrasi dan manfaatnya menjadi bagian dari solusi permasalahan yang terjadi ditingkat regional maupun internasional, dan sekaligus mengkoreksi radikalisme dan terorisme serta Islamophobia dengan menguatkan hadirnya Islam yang kompatibel dengan demokrasi karena Islam memang rahmatan lil alamin.

"Bahkan Sekjend PUIC (persatuan parlemen dari negara2 OKI) sangat mendukung inisiatif MPRRI, dan menyatakan akan menyediakan forum khusus untuk mewadahi kegiatan dari Forum yg diinisiasi oleh MPR ini, agar Forum Majelis Permusyawaratan, Majelis Syuro, Majelis Suyukh, dan lembaga keparlemenan lain yang sejenis tapi belum terwadahi secara spesifik di PUIC maupun organisasi parlemen internasional, untuk dapat menindaklanjuti kegiatan-kegiatan forum bersama dengan PUIC," kata Hidayat Nur Wahid dalam konperensi pers usai penutupan Konferensi Internasional yang digelar MPR di Hotel Pullman, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2022). Konperensi pers ini dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad.

Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syuro, atau Nama Lain yang Sejenis dari Negara-Negara Anggota Kerja Sama Islam yang dibuka di Gedung Merdeka tempat dahulu diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, diikuti oleh pimpinan Parlemen dari 15 negara dan dua organisasi internasional, konferensi itu berlangsung meriah sejak Senin (24/10/2022) hingga Rabu (26/10/2022).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Satu hal yang juga sangat penting bagi Indonesia adalah para delegasi yang beragam itu masih sangat menghormati dan terinspirasi dengan konferensi Asia Afrika tahun 1955 dengan Dasa Sila Bandungnya. Maka mereka menyepakati untuk menjadikan Dasa Sila Bandung sebagai spirit yang melandasi, menyemangati, dan menjadi rujukan historis visi dan misi dari Forum ini

Presiden PKS Tegaskan Komitmen Tranformasi Digital dan Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik

KUTIPAN

Jakarta (01/11) --- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu hadir secara langsung memenuhi undangan Komisi Informasi (KI) Pusat dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 pada Selasa (01/11) di Hotel Redtop, Jakarta Pusat.

Hadir mendampingi Presiden PKS, Wasekjen Komunikasi Publik, Ahmad Fathul Bari dan Sekretaris Bidang Humas, Kurnia Wijaya.

Syaikhu menyampaikan paparan di hadapan Para Komisioner KI Pusat perihal Keterbukaan Informasi Publik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam penjelasannya, Syaikhu menegaskan komitmen PKS dalam keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU.

"Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian dari badan publik yang mendapatkan sumber keuangan salah satunya dari APBN melalui dana Banpol, bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," jelas Syaikhu.

Lebih lanjut Syaikhu menyampaikan dalam melaksanakan amanat keterbukaan informasi publik, PKS telah menetapkan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP PKS.

"Partai Keadilan Sejahtera telah menetapkan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP PKS yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi seputar Partai Keadilan Sejahtera," lanjut Syaikhu.

Terakhir, sebagai upaya optimalisasi kemajuan teknologi, PKS berkomitmen melakukan transformasi digital dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Dalam berbagai program partai, komitmen dan semangat yang dibawa adalah Tranformasi Digital dan Kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk dalam hal Keterbukaan Informasi Publik," pungkas Syaikhu.

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

"Dalam berbagai program partai, komitmen dan semangat yang dibawa adalah Tranformasi Digital dan Kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk dalam hal Keterbukaan Informasi Publik,"

Hadiri Indo Defence 2022,

Habib Aboe: Pemerintah Perlu Dorong Alutsista Produk Dalam Negeri

KUTIPAN

Jakarta (02/11) -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, meminta agar Pemerintah lebih memerhatikan pengembangan produk alutsista buatan dalam negeri.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi acara Indo Defense 2022 di Jiexpo Kemayoran pada Selasa (02/11).

"Saya melihat banyak potensi besar dari industri pertahanan dalam negeri. Sudah seharusnya industri pertahanan dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah perlu memprioritaskan produk lokal untuk memenuhi alat dan perlengkapan pertahanan kita", ujar pria yang akrab disapa Habib Aboe itu.

Menurut Aboe, produk-produk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri yang dipamerkan di acara tersebut.

"Tentunya hal ini perlu mendapatkan dukungan dari Prmerintah agar industri pertahanan dalam negeri semakin kuat serta mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri", tegasnya.

Terakhir, Aboe menekankan pentingnya alutsista yang mampu diproduksi secara mandiri karena merupakan kebutuhan mendasar untuk mengamankan NKRI.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

"Saya melihat banyak potensi besar dari industri pertahanan dalam negeri. Sudah seharusnya industri pertahanan dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah perlu memprioritaskan produk lokal untuk memenuhi alat dan perlengkapan pertahanan kita",

Kunjungi Kanal Resmi Fraksi PKS DPR RI

Website
fraksi.pks.id

Instagram
fraksipksdprri

Twitter
@fraksipksdprri

Facebook
Fraksi PKS DPR RI

Youtube
PKSTV DPR RI

Nantikan Setiap Pekan